

Pengaruh Kemerdekaan Timor Leste terhadap Hubungan Australia dengan Indonesia



**Disusun oleh Rachael Ratican
Malang
Juni 2005**

Kata Pengantar

Laporan ini ditulis sebagai bagian terakhir program ACICIS- *Australian Consortium for "In-Country" Indonesian Study*- dengan bantuan banyak orang, termasuk program ACICIS baik di Perth maupun Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang menolong saya selama proses penelitian.

Terima kasih banyak kepada Program ACICIS untuk memberi kesempatan ini kepada saya untuk membolehkan saya belajar di Indonesia. Khususnya Pak David Armstrong untuk bantuannya sebelum permulaan Programnya, Pak Tom Hunter untuk bimbingannya dan Lestari dan staf ACICIS yang lain.

Lagi pula, berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang dan staf UMM untuk dedikasinya dan bantuannya. Khususnya kepada Pak Habib, Ibu Tri, Ibu Vina, Pak Wahid, Pak Sulismadi di kantor ACICIS dan semua dosen yang telah menolong saya. Selain itu terima kasih banyak kepada pembimbing saya, Pak Muslimin, untuk pimpinannya dan bantuannya selama proses penelitian. Pak Muslimin selalu bisa mempunyai waktu untuk menolong saya walaupun dia sibuk sekali, terutama di akhir semester. Dedikasinya sangat dinilai.

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Flinders University di Adelaide, Australia, dan semua dosen bahasa Indonesia di sana. Saya khususnya mau berterima kasih ke Dr Michele Ford, yang memberi semangat untuk belajar di Indonesia kepada saya, untuk dorongannya dan dukungannya.

Selanjutnya, saya ingin mengatakan terima kasih kepada teman-teman akrab di Malang, termasuk Kat, Ariella, Ridha, Rizal, Tejo, Tommy, Samid, Boy, Angga dan anak-anak CIBBM. Lagi pula, terima kasih kepada keluarga di Malang, Tante Dari, Om Nono, Nita dan Tante Eni. Tambahan lagi terima kasih kepada orang yang diwawancarai untuk kejujurannya.

Yang terakhir dan terpenting terima kasih banyak kepada keluarga saya di Australia, Mum, Dad, Claire and Sarah untuk sokongan yang tetap.

Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada semua.

Rachael Ratican
Malang, Juni 2005

Abstraksi

Sebagai mahasiswa yang mempelajari kajian tentang Hubungan Internasional, yang memfokuskan hubungan Australia dengan Indonesia yang dianggap sangat menarik. Bukan saja karena Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat, tetapi juga karena kedua negara memiliki sejarah, budaya, bahasa dan ideologi yang berbeda. Oleh karena itu sejak kemerdekaan Indonesia, hubungan Australia dengan Indonesia ditandai oleh dinamika pasang surut. Akan tetapi peristiwa yang memiliki potensi, dan yang memang hampir berhasil, untuk menghancurkan hubungan ini adalah kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999. Tujuan studi ini adalah memeriksa pengaruh kemerdekaan Timor Leste terhadap hubungan Australia dengan Indonesia, baik di tingkat pemerintahan maupun pada tataran masyarakat. Keduanya dianggap penting karena opini umum mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan tindakan pemerintah mempengaruhi persepsi-persepsi masyarakat.

Meskipun dampak-dampak bisa diuraikan secara mendalam, namun sejarah hubungan antara Australia dan Indonesia, serta sejarah hubungan antara Indonesia dan Timor Leste juga harus dijelaskan. Selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam hubungan Australia dengan Indonesia akan dibahas agar menggambarkan dampak-dampak nyata tentang kemerdekaan Timor Leste. Sementara komponen-komponen tentang sejarah dan perubahan-perubahan akan diriset melalui sumber-sumber data sekunder, seperti buku-buku, artikel-artikel dari jurnal dan dokumen-dokumen lain, informasi tentang persepsi-persepsi masyarakat akan dikumpul dari hasil wawancara. Orang-orang yang diwawancarai dipilih dari kegiatan mahasiswa dan dosen dari bermacam-macam universitas di Malang dan Surabaya. Dosen-dosen yang diwawancarai termasuk dosen dari jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang dan dosen dari jurusan Bahasa Inggris dari Universitas Merdeka Malang. Mahasiswa yang diwawancarai termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Bahasa Inggris dan Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang dan mahasiswa Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Orang ini dipilih karena dipikir bahwa mereka memiliki pahaman tentang Australia lewat pelajarannya. Meskipun dua dosen yang diwawancarai sudah mengetahui banyak tentang hubungan Australia dengan Indonesia mereka dapat menjelaskan peristiwa dari pandangan Indonesia.

Walaupun, awalnya Australia mendukung integrasi Timor Leste ke dalam Republik Indonesia, namun banyak peristiwa terjadi yang menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia sedikit mengalami gangguan. Masyarakat Australia sudah lama membantah dengan kebijaksanaan pemerintah yang dibuktikan berberapa demonstrasi dan usaha-usahan yang mendukung kemerdekaan Timor Leste. Akibatnya, waktu pemerintah Perdana Menteri John Howard mengubah kebijaksanaan terhadap kemerdekaan Timor Leste banyak orang, baik di Australia dan di Indonesia, menjadi heran. Ada tokoh politik Indonesia yang pasti merasa bahwa perubahan kebijaksanaan Australia mencampuri dalam soal domestik dan mengancam kedaulatan Indonesia. Perasaan ini dicerminkan dengan tindakan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada tahun 1999. Australia memainkan peranan menyolok dalam proses kemerdekaan Timor Leste, yang sudah lama dipikirkan oleh pembuat kebijaksanaan Australia sebagai isu domestik Indonesia. Lagi pula, ada orang yang percaya bahwa Australia baru mendukung kemerdekaan Timor Leste karena kepentingan sendiri, yakni sumber daya minyak yang terdapat di wilayah Selatan Timor. Kemerdekaan Timor Leste menimbulkan masing-masing kecurigaan tentang negara lain. Australia terlihat sebagai negara Barat yang mau mengontrol wilayah dan mencampuri dalam hal domestik negara Asia. Indonesia terlihat sebagai negara belum

maju secara demokratik, yang terkesan mendukung kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masyarakatnya sendiri. Salah paham sudah berjalan lama ditebalkan dan hubungan memburuk. Untuk kali pertama sejak Konfrontasi pada tahun 1966, pasukan Australia dan pasukan Indonesia berhadapan muka dalam keadaan konflik.

Sebagai akibat peranan Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste, hubungannya mengalami banyak perubahan, terutama dalam bidang politik dan militer. Mungkin ada perubahan ekonomik juga akan tetapi ini susah untuk menguraikan karena hubungan ekonomik sudah dipengaruhi oleh Krisis Moneter dan instabilitas politik dan sosial dalam Indonesia. Oleh karena itu indikator-indikator ekonomik tidak dapat dipercayai sebagai bukti untuk pemburukan hubungan Australia dengan Indonesia. Perubahan yang terjadi dalam hubungan militer sangat jelas. Pertama, perjanjian *Agreement on Mutual Security* (AMS) dilepaskan. Kedua, latihan bersama dibatalkan dan pasukan yang dulu berkerjasama menjadi lawan. Akhirnya, penjual senjata Australia pada Indonesia dihentikan. Perubahan dalam bidang politik dan diplomatik termasuk semua kunjungan politik dibatalkan dan politikus dalam Australia dan Indonesia mencela pihak lain secara terbuka. Selanjutnya, kerjasama dalam kerangka multinasional terbatas dan status '*high alert*' berada untuk Duta Besar. Secara keseluruhan hubungan Australia dengan Indonesia menjadi bermusuhan.

Bagaimanapun, orang yang diwawancarai tidak berpercaya bahwa perubahan dalam hubungan pemerintah mempunyai dampak terhadap hubungan antara manusia. Sebagai contoh, waktu mereka ditanya pendapat dan pikiran mereka terhadap Australia, tidak ada seorang yang menyebut peranan Australia dalam wilayah sebagai negatif. Sebetulnya, kebanyakan orang menjawab dengan ikon Australia; Sydney Opera House, kangeru, boomerang dan lain-lain atau fakta-fakta tentang Australia. Mungkin lebih penting orang yang diwawancarai tidak mengalami perubahan pendapat terhadap rakyat Australia dan hanya sedikit mengalami perubahan terhadap pemerintah Australia. Ada kemungkinan bahwa ini terjadi karena sudah lama sejak kemerdekaan Timor Leste, dan peristiwa lain sudah terjadi yang memperbaiki hubungan Australia dengan Indonesia. Selanjutnya, orang-orang yang diwawancarai tidak dipengaruhi langsung oleh peristiwa di Timor Leste. Lagi pula, hasil mungkin berbeda jika wawancara dilakukan pada daerah berbeda, seperti Timor Barat atau Jakarta. Akan tetapi, waktu ditanyakan tentang demonstrasi anti-Australia yang terjadi, semua mengakui bahwa ada orang di Indonesia yang pikir Australia mencampuri dalam soal domestik dan melanggar dauralat Indonesia. Selain itu, berberapa responden mengakui bahwa kepentingan Australia mengabdikan secara lebih baik dengan Timor Leste yang merdeka.

Sementara studi ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Timor Leste, dan peranan Australia dalam proses ini, mempunyai pengaruh langsung terhadap hubungan pemerintah antara Australia dan Indonesia, hubungan antara manusia lebih tabah dan lebih sulit untuk dipengaruhi. Kebanyakan orang-orang Indonesia menilai tindakan dan kebijaksanaan pemerintah Australia bisa terpisah dari hubungannya dengan warga negara Australia. Akan tetapi, hubungan antara manusia harus dipertimbangkan waktu membuat kebijaksanaan tentang Indonesia karena reaksi-reaksi rakyat terhadap peranan Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste tidak bisa dipakai sebagai contoh daripada reaksinya terhadap kebijaksanaan lain. Hal Timor Leste tidak mempengaruhi hidup sehari-hari kebanyakan orang Indonesia, padahal kebijaksanaan yang mempengaruhi hidup sehari-harinya akan menghasut reaksi berbeda.

Abstract

As an International Relations student the relationship between Australia and Indonesia is of great interest. Indonesia is not only Australia's closest neighbour geographically, but the two countries have distinct histories, cultures, languages and ideologies. Consequently since Indonesia's own independence the relationship between Australia and Indonesia has been characterised by a number of ups and downs. However, the one event that had the potential to, and almost did, destroy the relationship, was East Timorese independence in 1999. The goal of this study is to examine the effects of East Timorese independence on the Australian-Indonesian relationship, both at the governmental level and people-to-people level. The two are equally important because public opinion influences government policy whereas governmental actions also influence societies perceptions.

So that the impacts can be analysed in depth, the history of the relationship between, not only Australia and Indonesia, but Indonesia and East Timor as well. Furthermore, the changes which occurred in the Australia's relationship with Indonesia will also be discussed in order to demonstrate the real effects of East Timorese independence. While the history and policy changes components will primarily rely on secondary sources, information about societies perceptions will be based on the results of interviews. The interviewees were selected from the student and lecturer community of various universities in Malang and Surabaya. The lecturers interviewed included lecturers from the Governmental Science department at Muhammadiyah University Malang and English department at Universitas Merdeka Malang. The students interviewed included students from the Law faculty and English department at Muhammadiyah University Malang and from the Law faculty at University Airlangga in Surabaya. These people were selected because it was assumed they had at least some knowledge of Australia, possibly through their studies both at school and university. The two lecturers from the Government Science department possessed a great deal of information about Australia's relationship with Indonesia, one having studied at an Australian university, but their views were uniquely Indonesian.

Even though from the start Australia supported Indonesia's annexation of East Timor, many events occurred that inflamed tensions between the two countries. For a long time Australian society had disagreed with government policy towards East Timor and continued support East Timorese independence. Consequently, when Prime Minister John Howard changed the policies about East Timor many people, both in Australia and Indonesia, were surprised. Certainly there were Indonesian politicians who felt that the new Australian policy direction interfered in a domestic issue and threatened Indonesian sovereignty. This feeling was echoed by parts of society with the anti-Australian demonstrations in Jakarta in 1999. Australia played a conspicuous role in East Timorese independence, which had for the past twenty five years had been considered by Australian governments as a domestic issue for Indonesia. Moreover, many people believed that Australia's new found interest in East Timorese independence was motivated by a large oil deposit in the Timor Strait. East Timorese independence caused long-held, but often unspoken, suspicions of each other to come to the surface. Australia was seen as a power-hungry Western nation that wanted control in the region and that interfered in the domestic affairs of other countries. Indonesia was seen as a undemocratic country, which supported its Armed Forces violence against its own people. These misconceptions were reinforced

and the relationship deteriorated. For the first time since Konfrontasi in 1966 Australian and Indonesian troops came face-to-face in a hostile environment.

However, the interviewees did not believe that the change in government relations had any bearing on the people-to-people relationship. For example, when the interviewees were asked whether their thoughts or opinions about Australia, not one person responded with a negative image. Generally, people responded with traditional Australian icons; the Sydney Opera House, kangaroos, boomerangs and the like, or facts about Australia. Perhaps more importantly, interviewees did not change their opinions about Australian people and only slightly changed their opinion of the Australian government. There is the possibility that this occurred because East Timorese independence occurred many years ago and that bigger events have occurred more recently which improved the Australian-Indonesian relationship. Furthermore the results of the interviews may have been different if the interviews had been undertaken in Jakarta or West Timor. However, when interviewees were questioned about the anti-Australian demonstrations in Jakarta they acknowledged that there were Indonesians who thought Australia was interfering a domestic issue and breaching Indonesian sovereignty. Other than that, some respondents also believed that Australia's interests were better served by an independent East Timor.

While this study demonstrates that East Timorese independence, and Australia's role in this process, had a direct influence on the government level relationship, the people-to-people relationship was more genuine and harder to influence. Most Indonesians saw the Australian governments actions and policies as separate from their relations with Australian people. However, inter-person relationships must still be taken into consideration when making policy because Indonesian societies reaction to Australia's role in East Timor cannot be used as a precedent for their reactions to future policy decisions. The East Timor issue did not influence the daily lives of most Indonesians and policies which do influence their daily lives will provoke a different reaction.

Singkatan

<u>ABRI</u>	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
<u>ADF</u>	Australian Defense Force
<u>AMS</u>	Agreement on Mutual Security/ Persetujuan terhadap Saling Keamanan
<u>Apodeti</u>	Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor/Associacao Popular Democratica da Timorese
<u>AS</u>	Amerika Serikat
<u>ASEAN</u>	Assosiation of South East Asian Nations
<u>CIET</u>	Campaign for Independent East Timor/ Kampanye Timor Leste Merdeka
<u>Dubes</u>	Duta Besar
<u>Fretilin</u>	Front untuk kemerdekaan Timor/ Frente Revolucionario da Timorese
<u>HAM</u>	Hak asasi manusia
<u>IMF</u>	International Monetary Fund
<u>INTERFET</u>	International Force in East Timor/ Pasukan Internasional di Timor Lorosae
<u>KKN</u>	Korupsi, kolusi dan nepotisme
<u>KOTA</u>	Klibur Oan Timor Aswain/ The Sons of the Mountain Warriors
<u>KrisMon</u>	Krisis Moneter Asia
<u>Menlu</u>	Menteri Luar Negeri
<u>MPR</u>	Majelis Permusyawaratan Rakyat
<u>PBB</u>	Perserikatan Bangsa-bangsa
<u>PDII</u>	Perang Dunia II
<u>PKI</u>	Partai Komunis Indonesia
<u>TNI</u>	Tentara Nasional Indonesia
<u>TPS</u>	Tempat Pemungutan Suara
<u>UDT</u>	Uni Demokratik Timor/Uniao Democratica Timorese
<u>UNAMET</u>	United Nations Mission in East Timor/ Misi PBB di Timor Lorosae
<u>UNTAET</u>	United Nations Transistional Administration in East Timor/ Administrasi Transis PBB di Timor Lorosae

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Abstraksi	3
Abstract	4
Singkatan	7
Daftar Isi	8
Bab 1 Pendahuluan	10
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
Bab 2 Tinjauan Pustaka	14
A. Sejarah Proses Kemerdekaan Timor Leste	14
I. Sejarah Timor Leste	14
II. Revolusi Anyelir dan Peristiwa-peristiwa di Portugal	14
III. Integrasi ke dalam Republik Indonesia	16
IV. Insiden Dili	21
V. Kemerdekaan menjai kemungkin	24
VI. Mimpi Timor Leste Terkabal	28
B. Kontribusi Australia dalam Proses Kemerdekaan Timor Leste	31
C. Hubungan antara Australia dan Indonesia	38
I. Sebellum Kemerdekaan Timor Leste	39
II. Pada saat Kemerdekaan Timor Leste	50
III. Pasca kemerdekaan Timor Leste	53
D. Proses Perubahan yang Terjadi	59
I. Proses Politik	59
II. Proses Ekonomik	60
III. Aspek Sosial-Budaya	61
Bab 3 Metode Penelitian	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Informan Penelitian	64
C. Waktu Penelitian	65
D. Cara Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analaisis Data	65

Bab 4 Pembahasan Hasil Penelitian	67
A. Kontribusi Australia dalam Proses Kemerdekaan Timor Leste	67
B. Hubungan Australia dengan Indonesia	71
Bab 5 Penutup	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	79
Daftar Pustaka	81

Bab 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai mahasiswa yang mempelajari maka kajian tentang hubungan internasional, hubungannya antara Australia dan Indonesia menjadi sangat menarik. Hubungan ini ditandai oleh banyak pasang surut, terutama pasca pengumuman kemerdekaan Timor Leste. Akan tetapi peristiwa-peristiwa baru dapat memperbaiki hubungan dan menyebabkan pemerintah Australia untuk mengubah posisinya dalam daerah Asia Tenggara dan sikapnya terhadap negara-negara Asia Tenggara, khususnya terhadap Indonesia. Upaya penataan kembali hubungan Australia dengan Indonesia tentunya masih dilatar belakang oleh kemerdekaan Timor Leste. Peristiwa, seperti yang terjadi di Timor Leste, mempunyai efek-efek yang abadi karena mereka mengubah baik kebijaksanaan pemerintah maupun persepsi-persepsi masyarakat.

Timor Leste selalu menggemaskan Indonesia, terutama sejak Indonesia menggabungkan Timor Leste sebagai propinsi ke-27 Republik Indonesia, pada tahun 1976. Akan tetapi soal Timor Leste menimbulkan ketegangan antara Australia dan Indonesia sepanjang lima puluh tahun yang lalu, jauh sebelum Timor Leste bergabung dengan Indonesia. Ada banyak peristiwa yang menyoroti perbedaan pendapat antara Australia dan Indonesia berkenaan dengan soal Timor Leste. Misalnya, integrasi Timor Leste ke dalam Republik Indonesia, kematian lima (5) wartawan Australia yang dianggap tidak wajar, Laporan Dunn, artikel di koran *Sydney Morning Herald* (yang ditulis oleh Peter Jenkins), dan akhirnya Insiden Dili. Akan tetapi peristiwa yang paling serius, dan yang hampir menghancurkan hubungan Australia dengan Indonesia, adalah pengumuman kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999.

Australia tidak bisa mempunyai reputasi yang kurang baik di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Hubungan Australia dengan Indonesia sangat penting untuk hubungan Australia dengan negara Asia Tenggara yang lainnya, khususnya dengan negara-negara ASEAN (*Assosiation of South East Asian Nations*). Australia berbeda dari negara lain yang ada di wilayah ASEAN karena biasanya Australia mengikuti dan mendukung Amerika Serikat dan Eropa untuk banyak hal. Sebagai akibatnya kebanyakan negara-negara Asia Tenggara curiga terhadap Australia dengan berbagai aktivitasnya. Ketika Australia mengambil peranan dalam pengumuman kemerdekaan Timor Leste, maka negara Asia Tenggara lain merasa cemas tentang maksud-maksud Australia di wilayahnya. Selain itu, Indonesia sendiri merasa sangat cemas karena masih ada beberapa daerah yang mau merdeka atau melepaskan diri dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Meskipun perbaikan hubungan baru, kebijaksanaan dan tindakan yang lalu harus dipertimbangkan oleh Australia sebab kebijaksanaan dan hubungan harmonis yang ditentukan pada masa-masa yang akan datang.

Topik ini saya pilih karena menurut pendapat saya hubungan Australia dengan Indonesia adalah salah satu hubungan yang paling penting di bidang politik luar negeri Australia. Akan tetapi, kebanyakan orang Australia curiga terhadap Indonesia sebab mereka pikir bahwa orang Indonesia terlalu berbeda dari orang Australia. Oleh karena itu mereka tidak bisa atau tidak mau memahami budaya dan rakyat Indonesia. Selanjutnya, hubungan dengan Indonesia kurang menguntungkan Australia daripada hubungan dengan Jepang atau AS. Walaupun demikian hubungan dengan Indonesia tetap sangat penting untuk keberlangsungan kedua negara. Peristiwa seperti kemerdekaan Timor Leste mempunyai dampak-dampak yang abadi dan harus

dipertimbangkan kalau membicarakan dan membuat rencana untuk masa depan hubungannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste yang mempengaruhi persepsi/penilaian masyarakat.
2. Bagaimana kontribusi Australia dalam prosesnya mempengaruhi hubungan resmi antara Australia dan Indonesia, dengan fokus aspek-aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Hal ini dilakukan juga dalam rangka memahami sejarah sehingga penelitian ini sekaligus mengkaji perubahan-perubahan secara terperinci. Yang meliputi pertama penelitian menganalisa sejarah proses kemerdekaan di Timor Leste. Khususnya membahas sejarah Timor Leste sebagai bekas jajahan Portugis, integrasinya dalam Republik Indonesia, dan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Kedua hubungan Australia dengan Indonesia dianalisa dengan fokus pada sebelum kemerdekaan Timor Leste, pada saat kemerdekaan Timor Leste, dan pasca kemerdekaan Timor Leste. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang terjadi dapat dibahas dalam kerangka yang logis berdasar pendekatan ilmiah.

C. Tujuan Penelitian

Hubungan Australia dengan Indonesia sering melupakan pembicaraan tentang urusan-urusan luar negeri Australia, padahal persoalan ini menjadi sangat penting. Karena itu tujuan penelitian ini adalah menambah pengertian dampak-dampak politik luar negeri Australia terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia, di mana Indonesia merupakan tetangga yang terdekat dari negara Australia, walaupun hubungannya

masih seringkali terjadi kesalahpahaman dan ketegangan. Kedua negara yang bertetangga ini seringkali mengalami kesalahpahaman yang diakibatkan kesalahan dalam memandang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kedua negara ini. Namun baik Indonesia maupun Australia tidak memikul tanggung jawab atau mencoba kompromi, walaupun pada akhirnya kedua negara ini selalu berupaya untuk mencari penyelesaian dari persoalan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini akan mengkaji apakah reaksi pemerintah Indonesia yang resmi terhadap tindakan dan kebijaksanaan Australia menyebabkan reaksi masyarakat Indonesia, dan sebaliknya. Ataupun reaksi pemerintah menyebabkan reaksi masyarakat atau tidak, penelitian ini mengharapkan untuk menambah pengertian Australia terhadap Indonesia. Agar menghindari salahpahaman dan ketegangan yang akan datang, pemerintah dan rakyat Australia harus mengerti bagaimana kebijaksanaan dan tindakannya mempengaruhi pemerintah dan rakyat Indonesia, dan bagaimana pemerintah dan rakyat Indonesia menafsirkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Australia. Dengan demikian hal ini dapat dijadikan pertimbangan sekaligus pembahasan dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintah Australia yang akan datang di masa. Agar dapat menghindari kesalahpahaman sehingga ketegangan-ketegangan antara kedua negara yang bertetangga ini juga dapat dihindari.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

A. Sejarah Proses Kemerdekaan Timor Leste

I. Sejarah Timor Leste

Sejarah Timor Leste banyak ditandai oleh penderitaan dan kekerasan. Waktu rakyat Timor Leste mengumumkan kemerdekaan pada tahun 1999, mereka mengakhiri abad-abad kekuasaan asing dan kekerasan yang tersebar luas. Pemerintah Portugis menguasai daerah Timor Portugis (bekas nama untuk Timor Leste) sejak awal abad ke-16.¹ Politik penjajahan Portugis kurang baik dan rakyat Portugis “dinina bobokkan” sementara sumber-sumber alamnya dieksploitasi.² Walaupun, transisi dari kekuasaan Portugis tidak mengurangi kekerasan sehingga rakyat Timor Portugis terus menderita, di bawah penguasaan Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1999, masyarakat Timor Timur (nama Timor Leste pada saat berada dalam wilayah penguasaan Indonesia) diberikan kesempatan untuk memutuskan nasib sendiri dan mengakhiri zaman penderitaan.

II. Revolusi Anyelir dan Peristiwa-peristiwa di Portugal

Masalah merdeka atau integrasi untuk Timor Timur ditimbulkan karena peristiwa-peristiwa di Portugal. Portugal mengalami pergolakan politik sepanjang tahun 1974. Pada tanggal 25 April 1974 pemerintah Caetano digulingkan revolusi militer-*Revolusi Anyelir*- yang dipimpin Antonio de Spínola.³ Pemerintah Portugal yang baru memulai memodernisasikan ekonominya dan menarik kembali secara berangsur-

¹ A. Schwarz. 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. St. Leonards: Allen & Unwin. h. 198.

² Schwarz h. 198.

³ Khairul Jasmi. 2002. *Euricos Guterres. Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h. 2.

angsur dari jajahan di Afrika dan Asia.⁴ Ketika penguasaan Timor Portugis dilepaskan pemerintah Portugal, Timor Portugis diberikan kemerdekaannya.⁵

Saat itu banyak partai politik dibentuk termasuk UDT (Uni Demokratik Timor/ *Uniao Democratica Timorese*), Apodeti (Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor/ *Associacao Popular Democratica da Timorese*), Fretilin (Front untuk kemerdekaan Timor/ *Frente Revolucionario da Timor*), KOTA dan Trabalhista. UDT-Fretilin membentuk front anti-integrasi walaupun Apodeti, dan partai kecil yang lain, mendukung integrasi dengan Indonesia.⁶ Sejak pemulaan, Apodeti disokong, secara keuangan dan moril, pemerintah di Jakarta. Sepanjang tahun 1974 Indonesia memelihara pendirian bahwa Indonesia tidak berminat kepada penguasaan Timor Portugis. Betapapun, Indonesia terus menyokong tujuan Apodeti dalam cara non-militer.⁷ Akan tetapi Apodeti tidak disokong masyarakat Timor Portugis, sekalipun Jakarta mengatakan sebagian besar penduduk Timor Portugis mendukung Apodeti dan tujuannya integrasi dengan Indonesia.⁸

Pengabungan UDT-Fretilin didukung kebanyakan orang Timor Portugis tetapi pengabungan berantakan sebab perbedaan ideologi antara dua partai dan kecurigaan terhadap pihak/partai lain.⁹ Pada bulan Mei 1975 UDT menarik diri dari pengabungan dan ia menjadi kurang anti-integrasi dan lebih pro-integrasi. Dengan demikian Indonesia memperbesar kampanyenya mengasingkan Fretilin dari

⁴ Schwarz h. 200.

⁵ D, M, Snow. 2003. *Cases in International Relations: Portraits of the Future*. New York: Longman. h. 162.

⁶ Z, A, Makarim, dkk. 2003. *Hari-hari Terakhir Timor Timur. Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo. hh. xix-xxii.

⁷ Schwarz h. 201.

⁸ Schwarz h. 201.

⁹ Schwarz h. 202.

masyarakat Timor Portugis, masyarakat Indonesia, dan yang paling penting, negara-negara Barat. Indonesia melakukan ini oleh mengatakan Fretilin adalah partai sosialis/komunis yang mengancam Indonesia dan kapitalismenya dan demokrasiya.¹⁰ Walaupun Portugal tidak mendukung partai politik apa saja dalam secara aktif, kemerdekaan Timor Portugis dilebihkan, tetapi pemerintah Portugal juga tidak mau menghina pemerintah di Jakarta. Sebagai akibat Portugal memainkan peranan yang batas di ketetapan masa depan jajahannya. Akhirnya Fretilin menyatakan kemerdekaannya sebagai *Republica Democratica da Timor Leste* pada tanggal 28 Nopember 1975.¹¹ Ini dijawab oleh gerakan pro-integrasi dengan pengumuman Pernyataan Balibo yang merupakan pernyataan integrasi Timor Portugis di dalam Republik Indonesia, pada tanggal 30 Nopember 1975. Dan kemerdekaan Timor Portugis dialihkan.¹²

III. Integrasi ke dalam Republik Indonesia

Sesudah Pernyataan Balibo dinyatakan pengabungan UDT-Apodeti-KOTA-Trabalhista angkatan-angkatan bersenjata Indonesia menyerbu Timor Portugis supaya melindungi putusan integrasi dengan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1975, sebelum matahari terbit, Dili- ibu kota Timor Portugis- dibombardir oleh pasukan yang diangkut dengan kapal, dan pasukan-pasukan payung dari Kostrad.¹³ Penyerbuannya sekaligus berhasil dan tidak berhasil. Pasukan-pasukan payung mendarat di tempat yang salah, bukan kota Dili, tetapi di atas pasukan Fretilin yang sudah mundur dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Pasukan-pasukan Indonesia tidak bisa menyatukan rakyat Timor Portugis di bawah bendera Republik Indonesia. Akhirnya, pasukan Indonesia memperoleh kekuasaan yang terbatas. Akan

¹⁰ Schwarz h. 202.

¹¹ Jasmi h. 21.

¹² Jasmi hh. 19-20.

¹³ Schwarz h. 204.

tetapi ada lebih banyak korban, kerusakan fasilitas umum, dan perlawanan dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah sementara dibentuk oleh penguasa-penguasa Indonesia pada tanggal 17 Desember 1975. Kemudian Majelis Rakyat, yang beranggotakan 37 orang yang dipilih karena mereka mendukung integrasi, memilih integrasi ke dalam Republik Indonesia.¹⁴ Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 1976 Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk, menyusul dikeluarkannya Undang-undang No. 7 1976 tentang penyatuan Timor Timur dengan Republik Indonesia.¹⁵ Timor Timur menjadi propinsi ke-27 secara resmi dan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.

Pencaplokan Timor Portugis- yang sebagian besar penduduknya beragama Katolik- mengisyaratkan permulaan kampanye integrasi yang kejam.¹⁶ Banyak organisasi dunia, misalnya *Amnesty International*, memperkirakan bahwa sebanyak 100.000 orang Timor Portugis terbunuh oleh pihak keamanan. Kesimpulan ini dipertegas oleh Laporan Dunn (yang ditulis diplomat Australia yang dulu, James Dunn) yang mengatakan hampir 15 persen penduduk Timor Portugis dibunuh.¹⁷ Setelah Timor Portugis dikuasai Indonesia, dengan proses integrasi tetapi tetap akan menjatuhkan reputasi Indonesia di mata dunia.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timor Portugis memang akan menjadi perhatian negara-negara lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyesalkan penyerbuan Indonesia ke Timor Timur dan proses integrasi tersebut, tidak diakui oleh bahkan

¹⁴ Schwarz h. 204.

¹⁵ Jasmi h. 19.

¹⁶ Snow h. 162.

¹⁷ 'Dunn Mengganggu Adam Malik Keras'. Tempo. 26 Maret 1977 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 87.

PBB tetapi menganggap Timor Timur masih sebagai jajahan Portugis.¹⁸ Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi-resolusi resmi yang mengutuk tindakan baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) maupun pemerintah Indonesia, dan kekerasan yang terus terjadi. Portugal tidak memberi realitas yang jelas, Portugal hanya berealitas sekitar bagaimana menjawab penggabungan Timor Portugis dengan Indonesia. Jawaban Portugis yang pertama adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Akan tetapi, selama tahun akhir tujuh puluhan dan permulaan delapan puluhan pemerintah Portugis harus memutuskan apakah meneruskan pendirian kuat menentang penyerbuannya. Akan tetapi sebelum akhir delapan puluhan pemerintah Portugis sudah menjelaskan pendirian terhadap Timor Timur dan menaikkan tekanan terhadap PBB dan Indonesia untuk membolehkan pemutusan nasib sendiri.¹⁹

Meskipun penghukuman PBB yang berulang-ulang integrasi Timor Portugis ke dalam Republik Indonesia didukung secara mutlak oleh negara-negara yang terpenting- AS dan Australia. Waktu kemerdekaan dinyatakan Fretilin pada tanggal 28 Nopember 1975, Timor Leste tidak diakui Indonesia, Portugal Australia atau AS. Kekurangan pengakuan ini dimaksud oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda bahwa negara-negara ini mendukung integrasi Timor dengan Indonesia.²⁰ Indonesia memaklumi sokongan AS dan Australia karena negara-negara ini mampu mengancam Indonesia dengan penyerbuan yang untuk melindungi kemerdekaan Timor Leste. Sebaliknya, Australia, dan terutama AS, tidak mau menjadi terlibat dalam soal Timor Timur. Demikian juga Indonesia tidak mau membuat marah Australia dan AS. Bahkan rencana untuk integrasi diubahkan supaya penyerbuan tidak bertepatan dengan

¹⁸ Schwarz h. 204.

¹⁹ Schwarz h. 207.

²⁰ Schwarz h. 203.

kunjungan resmi Presiden AS Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger ke Jakarta.²¹ Ternyata sementara kunjungan ini Kissinger menyetujui untuk penyerbuannya. Akan tetapi Kissinger menanyakan penyerbuan diselesaikan dalam secara cepat dan efisien, dan tanpa penggunaan bantuan dari Amerika.²²

Ada bermacam-macam alasan untuk bantuan Amerika, dan Australia juga. Pertama soal kemerdekaan Timor Portugis yang timbul sejak zaman Perang Dingin, dan ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap reaksi-reaksi AS dan Australia. AS dan Australia baru menarik kembali pasukan-pasukannya dari Vietnam. Perang Vietnam sangat kejam dan pasukan-pasukan AS dan Australia menderita banyak korban. Akan tetapi AS tidak berhasil di Perang Vietnam dan Vietnam dikuasai pemerintah komunis. Oleh karena itu, waktu pemerintah Indonesia menggambarkan Fretilin sebagai partai politik yang komunis, AS menjadi sangat khawatir karena kalau Fretilin menguasai Timor Portugis berada satu negara lagi yang komunis dalam wilayah Asia.²³

Rezim Suharto memiliki sejarah panjang anti-komunisme. Pada tahun 1965 kudeta terjadi yang dipimpin perwira-perwira tentara. Menurut Suharto, perwira-perwira tentara ini bersama Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kudetanya dipadamkan Jenderal Suharto. Waktu Jend. Suharto menggantikan Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia Suharto dan pemerintahnya melarang PKI dan menindas komunisme di seluruh Indonesia.²⁴ Sebagai akibat Pemerintah Suharto disokong Australia dan AS karena Indonesia menjadi bersekutu yang kuat dengan mereka

²¹ Schwarz h. 204.

²² Schwarz h. 204.

²³ Schwarz h. 207.

²⁴ Snow h. 158.

dalam wilayah Asia. Pemerintah Suharto juga menyebabkan keamanan Indonesia untuk membantu dengan sistem-sistem ekonomik dan keamanan Barat.²⁵ Oleh karena itu AS, dan Australia, memutuskan bahwa hubungan yang baik dan bersahabat dengan Indonesia lebih penting daripada proses dekolonisasi yang adil atau dukungan untuk menarik diri.²⁶ Hak untuk memutuskan nasib sendiri untuk Timor Portugis diabaikan karena negara-negara Barat memerlukan sekutu anti-komunisme yang kuat dalam wilayah.

Dukungan Australia untuk Timor Portugis integrasi dalam Republik Indonesia dilembutkan kematian lima (5) wartawan Australia di Timor Portugis. Pada bulan Oktober 1975 wartawan-wartawan Australia dibunuh dalam kekerasan antara Fretilin dan gabungan UDT-Apodeti-Kota. Akhir Nopember 1975 Duta Besar Australia Richard Woolcott diberitahukan, dalam secara resmi, Kepala Bakin Letnan Jenderal Yoga Sugama bahwa mayat-mayat lima (5) wartawan Australia ditemukan di Balibo.²⁷ Menurut surat resmi ditulis Presidium Apodeti D. Guilherme Maria Gonvalces lima belas (15) pendukung Fretilin terbunuh dalam peperangan pada tanggal 22 Oktober, dan ada empat (4) mayat yang kulit putih. Kemudian, partol Apodeti menemukan dua (2) mayat di daerah pinggiran Balibo. Sebuah mayat kulit putih dan mempunyai dokumen-dokumen dan kamera.²⁸ Walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan, dipercaya mayat-mayat ini dimiliki lima (5) wartawan Australia. Reaksi masyarakat Australia terhadap kematian ini melembutkan dukungan untuk Indonesia, karena kematian terjadi dalam keadaan yang kurang jelas. Banyak orang

²⁵ Snow h. 158.

²⁶ Snow hh. 16- 17 dan Schwarz h. 207.

²⁷ “Nggak Ada Fretilin” (?). *Tempo*, 22 Nopember 1975 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia.) h. 79.

²⁸ “Nggak Ada Fretilin” (?)’h. 80.

Australia mendukung tuntutan Fretilin untuk kemerdekaan, dan ada orang Australia di Timor Portugis yang mencoba-coba untuk melembutkan tuntutan Indonesia untuk integrasi. Dan ada pendapat lain, yang mungkin lebih dapat dipercaya, yang menyerahkan wartawan Australia dibunuh tentara Indonesia.²⁹

IV. *Insiden Dili*

Selama era tahun-tahun delapan puluhan Timor Timur dan masalahnya tidak menganggap masalah untuk kebanyakan orang Indonesia. Ini terjadi karena media massa Indonesia mengikuti peranan pemerintah Indonesia dan tidak membahas soal Timor Timur.³⁰ Saat itu Timor Timur sudah menjadi bagian Republik Indonesia-propinsi ke-27. Akan tetapi, di mata banyak negara-negara, termasuk Australia, soal Timor Timur jauh dari penyelesaian.³¹ Kekerasan di Timor Timur terus karena perlawanan Fretilin terus. Tentara Indonesia menetapkan strategi *fence of legs*- yang memaksa orang Timor Timur untuk berjalan kaki di depan pasukan Indonesia yang mendekati posisi Fretilin supaya pasukan Fretilin tidak bisa menembak pasukan Indonesia tanpa melukai orang Timor Timur.³² Ada perkiraan bahwa lebih daripada seratus ribu (100.000) orang Timor Timur meninggal antara tahun 1976 dan tahun 1980 sebagai akibat tindakan militer, kelaparan dan keadaan sakit.³³

Akan tetapi di bawah penguasaan Indonesia keadaan di Timor Timur diperbaiki juga, khususnya selama tahun delapan puluhan. Pemerintah Indonesia membangun banyak sekolah, gereja dan rumah sakit. Lagi pula, pemerintah Indonesia juga mengaspal

²⁹ Schwarz h. 203.

³⁰ Schwarz h. 197.

³¹ Adhitama. T. 'Indonesia-Australia: Jalan Menuju Peningkatan Kerja Sama'. *Eksekutif*, September 1985 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 138.

³² Schwarz h. 205.

³³ Schwarz h. 205.

berberapa jalan di Timor Timur. Selama penguasa Indonesia pendapatan rata-rata tiap orang Timor Timur dinaikkan sampai US\$200 pada tahun 1990. Ini masih kurang separo pendapatan rata-rata tiap orang Indonesia tetapi lima kali sebanyak dibanding pendapatan di akhir penguasaan Portugal.³⁴ Di sisi lain, laporan pemerintah berada yang menyatakan di tujuh puluh lima persen (75%) enam puluh satu (61) Daerah di Timor Timur lebih daripada separo penduduk hidup dalam kemiskinan.³⁵

Ketegangan menjadi gawat pada tahun 1991 waktu Insiden Dili, juga dikenal sebagai Pembunuhan Besar-besaran Dili, terjadi. Ada tiga (3) sebab kejadian Insiden Dili. Pertama, ada pembukaan Timor Timur pada tahun 1988. Sebelum tahun 1988 perjalanan ke Timor Timur terbatas. Orang-orang yang mau berjalan ke Timor Timur harus ke menerima izin khusus dari pemerintah, dan izin ini sering ditolak. Lagi pula taktik Fretilin mengubah juga. Sebelumnya taktik Fretilin termasuk terutama perlawanan yang bersenjata. Akan tetapi, taktik Fretilin mengubah dari bersenjata ke provokasi dan politik. Akhirnya undangan untuk perutusan parlemen Portugis untuk mengelilingi Timor Timur.³⁶ Akan tetapi kunjungan dibatalkan, dan ini pembatalan mencetuskan kerusuhan untuk baik gerakan pro-integrasi maupun gerak anti-integrasi.

Perusuhan terjadi di depan Gereja Santo Antonio de Motael di Dili dan selama konfrontasi dua pemrotes terbunuh; Sebastio Gomes Rangel (pemuda anti-integrasi) dan Afonso Henriques (pemuda pro-integrasi).³⁷ Misa peringatan untuk Sebastio

³⁴ Schwarz h. 206.

³⁵ Schwarz h. 209.

³⁶ Jasmi h. 59.

³⁷ Jasmi hh. 59-60.

Gomes Rangel dilakukan pada tanggal 12 Nopember 1991.³⁸ Setelah misa sudah selesai du ribu lima ratus (2500) orang Timor Timur berarak ke Makam Santa Cruz. Prosesinya menjadi demonstrasi anti-integrasi di Makam Santa Cruz.³⁹ Demonstrasi adalah ramai sekaligus damai; tidak ada kekerasan.⁴⁰ Lalu pasukan Indonesia melepaskan tembakan kepada pemerotes-pemerotes.⁴¹ Sebagai akibat dua ratus tujuh puluh satu (271) orang dibunuh, dua ratus tujuh puluh delapan (278) orang diluka dan dua ratus tujuh puluh (270) orang hilang.⁴² Ada laporan yang menyatakan 271 korban dibunuh bukan saja sebagai akibat tembak dan kekacau-balauan yang menemani, melainkan juga sebagai akibat pasukan Indonesia menusuk dengan bayonet orang yang sudah dilukai.⁴³

Walaupun ada tuntutan bahwa lebih dari insiden ini terjadi di Timor Timur selama penguasaan Indonesia, Insiden Dili mendapat banyak perhatian dari seluruh dunia karena jurnalis-jurnalis internasional mampu memfilmkan dan mengambil foto-foto insiden dan warganegara dari negara lain diluka juga.⁴⁴ Insiden ini juga menyebabkan fokus dunia untuk mengalihkan pada perjuangan kemerdekaan Timor Timur dan masalah yang mereka alami.⁴⁵ Ali Alatas, Menlu Indonesia yang dulu, mengakui Insiden Dili adalah *turning point* yang memulai proses kemerdekaan di Timor Timur.⁴⁶

³⁸ 'Yudhoyono prays at site of Dili massacre'. *SMH.com Digital Fairfax*.

<http://www.smh.com.au/news/World/Yudhoyono-prays-at-site-of-Dili-massacre/2005/04/09/1112997218540.html?oneclick=true> diakses 25 April 2005.

³⁹ 'The Santa Cruz Massacre'. *East Timor Action Network US*.

<http://www.etan.org/timor/SntaCRUZ.htm> diakses 25 April 2005.

⁴⁰ Schwarz hh. 210-211.

⁴¹ 'Yudhoyono prays at site of Dili massacre' diakses 25 April 2005.

⁴² 'The Santa Cruz Massacre' diakses 25 April 2005.

⁴³ 'Yudhoyono prays at site of Dili massacre' diakses 25 April 2005.

⁴⁴ 'The Santa Cruz Massacre' diakses 25 April 2005.

⁴⁵ 'Yudhoyono prays at site of Dili massacre' diakses 25 April 2005.

⁴⁶ 'The Santa Cruz Massacre' diakses 25 April 2005.

Insiden Dili juga mempunyai dampak-dampak lain terhadap hubungan Indonesia yang lain. Misalnya, AS membatasi penjualan senjata-senjata AS pada Indonesia dan bantuan militer lain.⁴⁷ Insidennya juga menyebabkan Indonesia untuk mengubah kebijaksanaan militer di Timor Timur, dalam cobaan untuk mengurangi kecaman internasional. Brigadir Jenderal R.S. Warouw digantikan Brigjen Theo Syafei dan Mayor Jenderal Sintong Panjaitan digantikan Mayjen Leopold Mantiri.⁴⁸

V. Kemerdekaan menjadi kemungkin

Perjuangan rakyat Timor Timur disoroti lagi pada tahun 1996 waktu 2 tokoh Timor Timur, Jose Ramos-Horta dan Uskup Carlos Filipe Ximenes menerima hadiah Nobel.⁴⁹ Mereka dapat hadiah Nobel atas ‘karya mereka untuk suatu penyelesaian tepat dan damai mengenai penentangan di Timor [Leste]’.⁵⁰ Uskup Belo dapat hadiah untuk menyebabkan pemerintah Indonesia untuk memeriksa pembunuhan yang terjadi selama Insiden Dili pada tahun 1991. Pada sisi lain, Ramos-Horta dapat hadiah karena dia jubar internasional yang terkenal untuk perjuangan kemerdekaan Timor Timur.⁵¹

Sepanjang akhir tahun sembilan puluhan Indonesia mengalami perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Pertama pada tahun 1997 dan 1998 ekonomi Indonesia runtuh selama Krisis Moneter Asia (KrisMon). Sebagai akibat, banyak kerusuhan terjadi yang menuntut Presiden Suharto mengundurkan diri. Akhirnya Presiden Suharto memang mengundurkan diri dan proses demokratisasi dimulai.

⁴⁷ ‘The Santa Cruz Massacre’ diakses 25 April 2005.

⁴⁸ Jasmi h. 59.

⁴⁹ Snow hh. 162-163.

⁵⁰ 2000. *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae. Penentuan nasib sendiri melalui jajak Pendapat*. New York: Departmen Peneranga Publik. Perserikatan Bangsa-Bangsa. h. 6.

⁵¹ ‘East Timor democracy leaders named Nobel Peace Prize winners’. *CNN interactive. World News Story Page*. <http://www.cnn.com/WORLD/9610/11/nobel> diakses April 27 2005.

Presiden sementara B.J. Habibie mempunyai pengaruh besar terhadap proses kemerdekaan Timor Timur.

Presiden Habibie mengherankan seluruh dunia waktu, pada tahun 1999, dia mengumumkan dia akan menawari kesempatan untuk otonomi penuh kepada rakyat Timor Timur.⁵² Di bawah proposal Habibie pemerintah di Jakarta bertanggung jawab hanya untuk kebijaksanaan luar negeri, menjaga musuh dari penyerbuan oleh negeri asing, dan masalah keuangan.⁵³ Banyak ahli Indonesia perpercaya bahwa pengumuman ini adalah jawaban Presiden Habibie atas tekanan internasional.⁵⁴ Sampai tingkat tertentu ahli-ahli benar. Sebagai akibat KrisMon, pemerintah Indonesia masih mengandalkan negara-negara Barat, dan Jepang, untuk merekonstruksi ekonomi Indonesia.⁵⁵ Oleh karena itu Indonesia terpaksa untuk berkompromi soal lain juga, termasuk pendiriannya terhadap Timor Timur.

Proposal Habibie merupakan otonomi luas di mana Jakarta bertanggung jawab untuk hanya tiga (3) bidang; urusan hubungan luar negeri, pertahanan terhadap luar, dan aspek kebijaksanaan moneter dan fiskil.⁵⁶ Dalam bulan Agustus Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia dan Portugal bertemu untuk pembicaraan mendalam mengenai masa depan Timor Timur. Akan tetapi kedua pihak masih mengalami perbedaan pendapat. Indonesia menganggap pelaksanaan otonomi luas di Timor Timur sebagai penyelesaian akhir masalah

⁵² 'Pemilu dan kekerasan: Tantangan Tahun 1999-2000' oleh D,K, Emmerson dalam *Indonesia Beyond Soeharto: Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Donald, K, Emmerson (peny.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001. h. 630.

⁵³ G, Forrester. 2002. *Indonesia Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Wacana Intelektualitas Umat. h. 44.

⁵⁴ Snow h. 163.

⁵⁵ Emmerson h. 633.

⁵⁶ Forrester h. 44.

sementara Portugal melihat otonomi luas sebagai langkah pertama dalam proses kemerdekaan Timor Timur.⁵⁷

Perjanjian Habibie, yang mendadak, mengganggu banyak pemimpin Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena menurut pendapat mereka jika Timor Timur bisa terpisah dari Indonesia mengakibatkan kerugian terhadap persatuan Republik Indonesia.⁵⁸ Walaupun demikian, pemerintah Habibie merekomendasikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membatalkan undang-undang 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia.⁵⁹ Perjanjian Habibie menganjurkan banyak lawan di baik Indonesia maupun Timor Timur. Banyak orang Indonesia berpendapat sama pemimpin TNI yakni, persatuan Republik Indonesia diancam jika Timor Timur merdeka. Lagi pula, orang Timor Timur percaya bahwa masa depan Timor Timur bergantung pada Indonesia.⁶⁰

Meskipun lawanan ini proses penyelesaian soal Timor Timur diteruskan. Awal tahun 1999 banyak pertemuan terjadi di New York. Pertemuan terjadi pada tanggal 7 Februari 1999 sampai 8 Februari, dan dihadiri Menlu Portugal Jaime Gama dan Menlu Indonesia Ali Alatas. Akan tetapi, mereka tidak bisa menyetujui apakah otonomi yang menawarkan adalah penyelesaian akhir atau tindakan sementara.⁶¹ Kemudian ada pertemuan lagi, pada tanggal 10 Maret sampai 11 Maret di New York yang diputuskan semua orang Timor Timur (yang masih tinggal di Timor Timur dan

⁵⁷ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 7.

⁵⁸ Emmerson h. 632.

⁵⁹ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 8.

⁶⁰ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. p.

⁶¹ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 10.

yang sudah di luar Timor Timur) mendapat kesempatan untuk memberikan suara untuk menerima atau menolak otonomi yang menawarkan.⁶²

Dengan kemungkinan otonomi luas atau kemerdekaan lengkap menjadi makin nyata, keadaan di Timor Timur menjadi makin penuh harapan. Bagaimanapun, insiden-insiden terjadi yang melembutkan perasaan harapan. Misalnya, pada masa antara 6 April 1999 dan 17 April, sedikit-dikitnya tiga puluh delapan (38) orang terbunuh. Pada tanggal 6 April milisia pro-integrasi membunuh dua puluh lima (25) orang yang menghadiri upacara di gereja di Liquica. Sebelas (11) hari kemudian lebih dari tigabelas (13) orang, yang berlindung di dalam rumah pemimpin pro-merdeka Manuel Carrascalao di Dili, dibunuh milisia pro-integrasi.⁶³

Akan tetapi pertemuan terakhir dalam New York, antara tanggal 21 dan 23 April 1999 menyusun perjanjian tentang masa depan Timor Timur. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 (lihat Lampiran 2). Ada dua pasal yang sangat penting; Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menyatakan jika proposal diterima 'pihak Indonesia harus memulai tindakan konstitusional yang diperlukan untuk implementasi kerangka kerja otonomi'. Lagi pula pihak Portugal juga harus memulai proses 'yang perlu untuk menghapus Timor Lorosae dari daftar Teritorial yang tidak berada di bawah pemerintahan sendiri dari Majelis Umum PBB, dengan demikian mencabut masalah Timor Lorosae dari agenda internasional'.⁶⁴ Pasal 6 menetapkan bahwa jika otonomi ditolak Indonesia harus memulai tindakan konstitusional untuk mengakhiri kaitannya dengan Timor Leste. Indonesia dan Portugal, serta Sekretaris Jenderal PBB

⁶² Forrester hh. 44-45.

⁶³ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 10.

⁶⁴ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 11.

menyetujui cara untuk pengalihan kekuasaan yang damai.⁶⁵ Selanjutnya Perjanjian 5 Mei menetapkan bahwa Indonesia bertanggungjawab untuk keamanan Timor Timur karena PBB tidak memaui mengambil alih jajak pendapat karena keamanan stafnya tidak bisa dijamin.⁶⁶ Menurut rencana jajak pendapat terjadi 30 Agustus 1999.⁶⁷ Akhirnya, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dalam secara jelas, ‘Apakah anda menerima otonomi khusus yang diusulkan bagi Timor Lorosae dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia?’ atau ‘Apakah anda menolak otonomi khusus yang disarankan untuk Timor Lorosae, yang menjurus pada permissahan Timor Lorosae dari Indonesia?’⁶⁸

VI. Mimpi Timor Leste Terkabal

Pada tanggal 30 Agustus 1999 rakyat Timor Timur mempunyai kesempatan untuk menentukan nasib sendiri. Ada ragu-ragu ataukah banyak orang memberikan suara atau tidak. Selama hari-hari sebelum jajak pendapat kelompok/milisia pro-Indonesia melakukan kampanye teror supaya mencegah rakyat Timor Timur dari memberikan suara untuk menolak otonomi khusus. Bagaimanapun, pada tanggal 30 Agustus ribuan orang Timor Timur mengatasi ketakutan dan ancaman kekerasan dan pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara untuk menerima atau menolak otonomi khusus.⁶⁹ 98.6% orang Timor Timur, yang memenuhi syarat dan diregistrasi, memberikan suara. Hasilnya diluar dugaan- 78.5% suara menolak otonomi khusus dan menerima kemerdekaan.⁷⁰

⁶⁵ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 11.

⁶⁶ Emmerson h. 637.

⁶⁷ Emmerson h. 633.

⁶⁸ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 12.

⁶⁹ Emmerson h. 635.

⁷⁰ Snow h. 156.

Dalam Perjanjian tersebut dulu pemerintah Indonesia menerima tanggungjawab untuk keamanan Timor Timur. Akan tetapi, waktu hasil menjadi jelas- bahwa rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus dalam Republik Indonesia- kekerasan meletus lagi. Ada bukti dan laporan yang terpercaya yang menyatakan elemen TNI terlibat. Semua pihak mengakui bahwa sekalipun TNI tidak terlibat, mereka tidak bisa atau tidak mau menghentikan kekerasan.⁷¹ Sungguhpun tentara Indonesia tidak bisa menghentikan kekerasan, pemerintah Indonesia tidak membolehkan tentara asing, termasuk tentara PBB, masuk Timor Timur untuk memulihkan hukum dan tata tertib.⁷²

Setelah kekerasan di Timor Timur berjalan, reaksi dunia berubah. Mula-mula, negara-negara Barat enggan untuk mencampuri keadaan di Timor Timur. Lalu pemerintah AS menghentikan semua penjualan senjata dan hubungannya militer dengan Indonesia. Ada tanda-tanda bahwa pemerintah AS juga mau melaksanakan sanksi ekonomis terhadap Indonesia.⁷³ Selanjutnya, setelah pemungutan suara, setidaknya enam (6) personil lokal UNAMET (*United Nations Mission in East Timor/ Misi PBB di Timor Lorosae*) terbunuh dalam kekerasan yang dijalankan. Oleh karena keamanan personil UNAMET, baik lokal dan internasional, tidak bisa dijamin Wakil Khusus Ian Martin merekomendasi evakuasi seluruh staf UNAMET ke Darwin.⁷⁴ Dan dengan bantuan *Australian Defense Force* (ADF) kebanyakan stafnya dievakuasi.⁷⁵

⁷¹ Snow h. 636.

⁷² Snow h. 636.

⁷³ Snow hh. 636-637.

⁷⁴ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* hh. 48-51.

⁷⁵ 'At the launch of the book *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*' *Foreign Ministers Webpage* <<http://www.foreignminister.gov.au> diakses 16 Mei 2005.

Akhirnya, pada tanggal 12 Septmeber Presiden Habibie mengubah pendirian dan membolehkan pasukan internasional untuk mengakhiri keadaan di Timor Timur.⁷⁶ Di bawah permimpinan PBB INTERFET (*International Force in East Timor/ Pasukan Internasional di Timor Lorosae*) didirikan untuk memulihkan pendamaian dan menghentikan kekerasan. Supaya INTERFET bisa mempunyai kuasa yang lengkap, TNI harus mengundurkan diri ke Timor Barat. Akhrynya INTERFET memulihkan stabilitas ke Timor Leste dan proses kemerdekaan dijalankan. Dalam Perjanjian 5 Mei Indonesia dan Portugal menyetujui untuk cara pengalihan kuasa. Pertama, UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor/ Administrasi Transis PBB di Timor Lorosae*) memangku kendali untuk administrasi di Timor Leste. UNTAET dibentuk resolusi Dewan Keamanan 1272, pada tanggal 25 Oktober 1999, sebagai pemerintah sementara sistem hukum dan sistem pemerintahan dibentuk. Langkah kedua memulai tanggal 30 Mei 2000 waktu pemerintah Timor Leste merupakan gabungan antara UNTAET dan warga Timor Leste.⁷⁷ Selama masa ini rakyat Timor Leste menyiapkan untuk mengambil kendali dalam secara penuh, pemilu Presiden dan pemilu Majelis Permusyawaratan Nasional dijadikan. Akhirnya, Timor Leste menjadi negara benar- pemerintah sendiri yang lengkap- pada tanggal 20 Mei 2002.⁷⁸ Tanggal ini menjadi akhir masa penderitaan untuk rakyat Timor Leste.

⁷⁶ Snow h. 637.

⁷⁷ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae* h. 85.

⁷⁸ 'Statement. 15 May, 2002. East Timor: Birth of a Nation'. *Foreign Ministers Webpage*. http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020515_fa_etimor.html diakses 16 Mei 2005.

B. Kontribusi Australia dalam Proses Kemerdekaan Timor Leste

Selama hampir perempat abad Australia jadi salah satu negara yang mendukung integrasi Timor Portugis dengan Indonesia.⁷⁹ Selama tahun 1974 dan 1975 Perdana Menteri Australia Gough Whitlam dan pemerintahnya mendukung integrasi Timor Portugis dalam Republik Indonesia.⁸⁰ PM Whitlam mengumumkan kebijaksanaan non-intervensi terhadap soal Timor Portugis. Itu dikatakan, PM Whitlam menguraikan bahwa Timor Portugis merdeka yang mendukung Barat adalah alternatif lebih enak.⁸¹ Meskipun sekarang ada bukti yang memperlihatkan Whitlam tidak berunding dengan kabinetnya, PM Whitlam menyetujui dengan integrasi, akan tetapi cara yang integrasi terjadi.⁸² Pendapatnya berdasar percayaan bahwa Timor Timur, sebagai negara merdeka, tidak dapat berjalan karena Timor Portugis terlalu kecil dan tidak ada ekonomi kuat.⁸³ Saat itu Dubes Australia di Jakarta Richard Woolcott menulis laporan yang menjelaskan alasan untuk putusan. Misalnya oleh mengakui integrasi Timor Timur memperbaiki hubungan Australia dengan Indonesia karena itu membuktikan paham mendalam masalah internal Indonesia.⁸⁴ Jika tidak ada persetujuan bersama tentang soal Timor Timur antara menteri-menteri kebijaksanaan bisa diganti. Bahkan empat Perdana Menteri Australia yang berikutnya, Malcolm Fraser, Bob Hawke, Paul Keating dan pun John Howard, mengakui Timor Timur

⁷⁹ **Peter Chaulk**

⁸⁰ B. Burton. 2005. 'Australia: Ex-Premier Whitlam ducks queries on East Timor Views' *Global Information Network*. 4 Januari diakses melalui ProQuest.

⁸¹ 'Timor, Setelah Petrodollar'. *Tempo* 25 Oktober 1975 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 74.

⁸² H.D. Anderson. 1984. 'Australia-Indonesia Relations' dalam *Regional Dimesnions of Indonesia-Australia Relations*. Jakarta : CSIS. h. 13.

⁸³ Burton. ProQuest.

⁸⁴ Burton. ProQuest.

sebagai propinsi Indonesia.⁸⁵ Namun maupun kebijaksanaan pengakuan rakyat Australia dan kadang pemerintah juga, menyatakan pencelaan terhadap kekerasan yang dijalankan di Timor Timur. Pencelaan ini dicerminkan perubahan kebijaksanaan yang terjadi pada tahun 1998. Sampai tingkatan tertentu perubahan terjadi karena peristiwa dalam luar Indonesia. Waktu Presiden Suharto memundurkan diri dalam akhir tahun 1998 pintu untuk perubahan dibuka. Survei rahasia tentang pendapat orang-orang Timor, baik dalam Timor Timur dan keluar Timor Timur, terhadap masa depan 'negara'nya dilakukan pemerintah Australia pada bulan Juli 1998.⁸⁶ Dahulunya, pemerintah Australia menyatakan bahwa tidak ada dukungan populer untuk kemerdekaan.⁸⁷ Hasil surveinya mempertunjukkan pendapat rakyat Timor Timur sudah mengubah. Saat itu dukungan populer sudah kuat dan terus menambah.⁸⁸ Perubahan kebijaksanaan ini mencapai puncak waktu PM Howard mengirimkan surat yang menguraikan pendekatan ke soal Timor Timur yang berbeda kepada Presiden Habibie dalam bulan Desember.⁸⁹ Surat ini menggambarkan proposal untuk otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peranan Australia yang langsung dalam proses kemerdekaan Timor Timur menambah dengan konperensi tingkat tinggi antara Howard dan presiden Habibie di Bali pada bulan April 1998.⁹⁰ Di konperensi ini Presiden Habibie menyetujui untuk membolehkan jajak pendapat tentang masa depan Timor Timur.⁹¹ Lalu, pada tanggal 27 Januari 1999, Indonesia mengumumkan dalam secara resmi

⁸⁵ Sudarsono. J. 'Australia-Indonesia: Tukar Pikiran Akal Sehat'. *Tempo*. 11 Agustus 1984 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia*. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988. Jakarta: PT Gramedia.h. 135.

⁸⁶ 'At the launch of the book East Timor in Transistion 1998-2000: An Australian Policy Challenge' diakses 16 Mei 2005.

⁸⁷ Burton. ProQuest.

⁸⁸ 'Statement, 15 May, 2002, East Timor: Birth of a Nation' diakses 16 Mei 2001.

⁸⁹ 'At the launch of the book East Timor in Transistion 1998-2000: An Australian Policy Challenge' diakses 16 Mei 2005.

⁹⁰ 'Statement, 15 May, 2002, East Timor: Birth of a Nation' diakses 16 Mei 2005.

⁹¹ W. Maley. 2000. 'Australia and the East Timor crisis: Some critical comments'. *Australia Journal of International Affairs* Juli 54 (2), h. 152.

bahwa jajak pendapat terhadap masa depan Timor Timur terjadi. Selama saat perundingan Australia memainkan peranan yang kedua langsung dan individu. Masalah ditimbulkan setelah hasil jajak pendapat diumumkan. Sebagai akibat kerkerasan yang terjadi di Timor Timur masyarakat dunia terpaksa untuk mencampuri. Australia memainkan peranan besar dalam setiap langkah intervensi PBB. Langkah pertama adalah UNAMET, misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat. UNAMET beranggota dari seluruh dunia akan tetapi warga negara Australia merupakan bagian besar. Lagi pula waktu staf PBB harus dievakuasasi, mereka dievakuasasi ke Darwin, di Territori Utara, Australia, dan naik pesawat Australia Defence Force (ADF).

Kontribusi Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste ditambah lagi waktu keadaan dalam Timor Timur diburuk setelah hasil yang mendukung kemerdekaan diumumkan. Meskipun jaminan Indonesia untuk melindungi keamanan di Timor Timur milisia-milisia menterorkan masyarakat Timor Timur dan staf PBB. Akibatnya INTERFET dibentuk PBB dengan pimpinan Australia.⁹² Untuk pasukan dibolehkan untuk masuk Timor Timur harus menjadi pasukan multinasional karena pasukan Australia saja atau tindakan unilateral Australia dianggap tindakan perang.⁹³

Dalam kapasitas ini Australia memainkan peranan besar. Sebagai negara paling maju dan kuat dalam wilayah, tanggung jawab diberikan kepada Australia untuk merupakan inti pasukan dan logistis INTERFET.⁹⁴ Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1264 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 1999 menyetujui pasukan

⁹² 'Statement, 15 May, 2002, East Timor: Birth of a Nation' diakses 16 Mei 2005.

⁹³ J. Cotton. 2001. 'Against the grain: The East Timor Intervention'. *Survival*. Spring 43 (1) diakses melalui ProQuest.

⁹⁴ Cotton. ProQuest.

multinasional yang dipimpin oleh Australia, dan kebanyakan pasukan berasal dari Australia.⁹⁵ Pada awal, diharapkan Australia menyumbang kira-kira 1500 pasukan. Walaupun dengan keadaan makin buruk kebutuhan pasukan makin menambah. 4500 pasukan disumbang Australia dalam kerangka INTERFET.⁹⁶ 15,000 pasukan Australia lagi disumbang untuk pasukan penjaga perdamaian.⁹⁷ Penyerban pasukan penjaga perdamaian INTERFET adalah kali pertama pasukan Australia dan pasukan Indonesia berhadapan muka dalam keadaan bermusuhan. Bahkan, dulu pasukan Australia dan pasukan Indonesia berlatih bersama. Selanjutnya, sementara zaman Suharto banyak pertukaran antara komandan dan tentara biasa dari Australia ke Indonesia dan sebaliknya.

Dalam secara finansial Australia menyumbang sebagian besar dana internasional. Bantuan Berperikemanusiaan, pada tahun 1999 dan 2000 berjumlah A\$81 juta. A\$150 juta lagi melalui 4 tahun, sebagai bantuan bilateral, dijanjikan pemerintah Australia. Dalam tahun pertama ongkos Pasukan Penjaga Perdamaian untuk Australia berjumlah AS\$550 juta.⁹⁸ Antara permulaan operasi Penjaga Perdamaian sampai akhir tahun 2001 kontribusi Australia pada operasi tersebut berjumlah A\$1,4 milyar.⁹⁹

Kontribusi Australia ini yang tersebut adalah kontribusi resmi. Walaupun ada pandangan bahwa Australia menyumbang proses kemerdekaan Timor Leste dalam secara yang tidak resmi juga. Pandangan ini yang menimbulkan tekanan dan masalah serius antara Australia dan Indonesia. Setiap kecaman peranan Indonesia di Timor

⁹⁵ Cotton. ProQuest.

⁹⁶ Cotton. ProQuest.

⁹⁷ 'Statement, 15 May, 2002, East Timor: Birth of a Nation' diakses 16 Mei 2005.

⁹⁸ Cotton. ProQuest.

⁹⁹ 'Statement, 15 May, 2002, East Timor: Birth of a Nation' diakses 16 Mei 2005.

Timor dinafsirkan sebagai dukungan untuk kemerdekaan. Bahkan pada saat integrasi Timor Portugis ke dalam Republik Indonesia pendapat rakyat Australia tidak menyetujui kebijakan dan tindakan pemerintah Australia.¹⁰⁰ Sebagai akibat banyak orang Australia memang menyokong perjuangan kemerdekaan Timor Leste dalam secara pribadi. Fretilin menyedot dukungan dari banyak kelompok dalam masyarakat Australia.¹⁰¹ Pertama, 20,000 warganegara Timor Timur tinggal di Australia dan walaupun tidak semua mendukung gerakan merdeka, sebagian terbesar menyokong kemerdekaan.¹⁰² Selanjutnya banyak tokoh Fretilin juga tinggal di Australia.¹⁰³ Kedua, selain warganegara Timor Timur, Fretilin juga disokong bagain Partai Buruh Australia yang setuju dengan perjuang dan ideologi Fretilin.¹⁰⁴ Ketiga, kaum hukum percaya penyerbuan Indonesia di Timor Timur tidak sah menurut hukum internasional. Ini bisa dianggap sebagai sokongan untuk Timor Timur.¹⁰⁵

Akan tetapi, mungkin kelompok terpenting adalah yang mengingat bantuan orang Timor Timur untuk pasukan Australia dalam Perang Dunia II.¹⁰⁶ Biasanya, kelompok ini bisa memperhitungkan untuk mendokong pendirian pemerintah lawan komunisme di wilayah dan oleh karena itu pendirian terhadap Timor Timur juga. Akan tetapi hubungan emosional berada antara masyarakat Timor Timur dan masyarakat Australia. Selama PDII masyarakat Timor Timur memainkan peranan penting dalam penaklukan pasukan Jepang. Perasaan *mateship* masih berada antara kedua

¹⁰⁰Rosihan Anwar. H. 'Yang mengganjal dan yang Melancarkan Hubungan Australia-Indonesia'. Kompas, 24 April 1979 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia., h. 93.

¹⁰¹ Mohamad. G. 'Apa yang Bisa (dan Tidak Bisa) Dilakukan Fraser'. Tempo 9 Oktober 1976 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia.h. 82.

¹⁰² Chaulk. ProQuest.

¹⁰³ Rosihan Anwar. h 93.

¹⁰⁴ 'Timor, Setelah Petrodollar'. h. 74.

¹⁰⁵ Rosihan Anwar . h 93.

¹⁰⁶Rosihan Anwar. h 93.

masyarakat. Oleh karena itu bagain besar masyarakat Australia merasa wajib untuk menolong masyarakat Timor Timur dalam perjuangannya untuk kemerdekaan.

Pemerintah Australia juga membolehkan pembangunan pemancar siaran-siaran radio Fretilin di Darwin. Lagi puli, Kampanye untuk Timor Leste Merdeka (*Campaign for an Independent East Timor- CIET*) juga mempunyai pemancar penyambung di Sydeny yang digunakan untuk menghubungi markas besar PBB di New York dan markas besar Fretili di Mozambique.¹⁰⁷ Sebab pemerintah Australia tidak melarang pembangunan ini dipahami Indonesia sebagai dukung yang tidak diucapkan untuk gerakan merdeka Timor Leste.

Selain kontribusi masyarakat Australia, kontribusi Australia dalam kerangka PBB juga mempunyai sisi resmi dan sisi yang tidak resmi. Kontribusi Australia sendiri dalam intervensi PBB lebih besar daripada negara lain. Dalam buku Hari-hari Terakhir Timor Timur ditulis oleh Makarim, Kairupan, Sugiyanto dan Fatah, pendapat ini bisa dilihat. Menurut penulis-penulis misi PBB tidak netral, dan karena sebgain besar misi PBB asal Australia, orang Australia misa memanipulasi proses jajak pendapat. Misalnya, staf PBB asal Australia menunjukkan ‘cenderung partisan memihak kelompok antiintegrasi’.¹⁰⁸ Lagi pula, kontribusi Australia, personel dan peralatannya, adalah sangat ingin dan sangat besar. Ini tampak terjadi bukan saja untuk demi UNAMET dan masyarakat Timor Timur, melainkan juga kepentingan lebih besar seperti sumber-sumber alam, sekutuan dengan AS dan status Australia

¹⁰⁷ ‘Dunn Mengganggu Adam Malik Keras’. Tempo. 26 Maret 1977 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia.. h 87.

¹⁰⁸ Makarim. dkk. h 11.

dalam wilayah.¹⁰⁹ Selanjutnya, penuli-penulis juga mencatat bahwa, pertama, pejabat Australia mengunjungi Dili lebih sering daripada ‘negara sahabat’ yang lain. Kedua, Atase Pertahanan Australia memiliki ‘pos’ di Dili walaupun pemerintah Indonesia minta Australia bersabar dan menunggu untuk hasil jajak pendapat. Australia sudan mengubah dari negara sahabat ke negara musuh yang mencampuri dalam soal Timor Timur. Menurut penulis-penulis Australia mengorbankan hubungannya dengan Indonesia ‘hanya karena masalah Timor Timur’.¹¹⁰

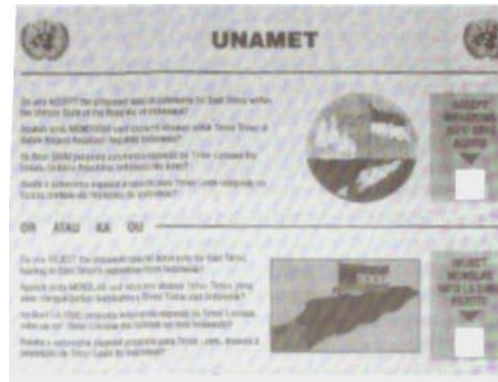
Menurut pandangannya sukarelawan PBB yang asal Australia juga memanfaatkan posisinya sebagai staf PBB untuk menolong kelompok antiintegrasi oleh penyelundupan senjata, obat dan peralatan bagi Fretilin dan kelompok antiintegrasi lain. Ternyata ini dilakukan lewat penerbangan gelap, yakni penerbangan yang tidak resmi.¹¹¹

Selanjutnya, beberapa wartawan Australia dideportasi pemerintah Indonesia karena mereka usaha mempengaruhi para pemilih di Timor Timur. Lalu, tiga turis Australia juga dideportasi karena mereka kedapatan membawa dan menyebarkan kartu suara yang suda dilubangi. Yakni, kartu suara itu sudah dilubangi untuk menolak otonomi dan tidak membolehkan penduduk Timor Timur untuk memberi suara sendiri.

¹⁰⁹Makarim. dkk. h 12.

¹¹⁰Makarim. dkk. h 12.

¹¹¹Makarim. dkk h. 168.



Dan ternyata kartu suara itu deterlibatkan oleh dau warganegara Australia.¹¹²

Warganegara Australia yang lain juga meliputi keadaan yang tidak sopan dan tidak netral.

Mengingat peristiwa-peristiwa ini knotribusi Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste memiliki dua tingkatan; satu yang resmi dan stau yang tidak resmi. Pastilah tindakan yang tidak resmi lebih menghasut karena biasanya itu tidak diakui dan lebih sulit untuk dilarang. Bagaimanapun, kedua tingkatan kontribusi Australia dilihat Indonesia sebagai penkhianatan oleh teman akrab. Australia mau mengorbankan hubungan sahabat dengan Indonesia untuk kepentingan yang lebih besar.

C. Hubungan antara Australia dan Indonesia

Australia dan Indonesia sebagai tetangga memilike hubungan unik. Kedua negara juah berbeda; Indonesia adalah nusantara pulau yang subur dan bergunung-gunung, sedangkan Australia adalah sebuah benua yang kering sekali.¹¹³ Perbedaan berada dalam secara manusia dan sejarah juga. Maka dari itu, ideologi dan kebutuhan sering berbeda juga. Akan tetapi, kepentingan yang bersamaan. Kepentingan ini

¹¹²Makarim. dkk. h. 168.

¹¹³ Anderson. h. 10.

menyebabkan hubungan menjadi harmonis padahal perbedaan bisa menimbulkan tekanan dan curigaan. Keadaan hubungan tergantung apakah perbedaan atau kepentingan yang bersamaan ditekankan.

Setiap hubungan kirupakan banyak komponen sebagaimana komponen politik, militer, diplomatik, ekonomik dan sosial-budaya. Sebagian ini difokuskan tiga komponen; politik yang termasuk diplomatik dan militer, ekonomik dan sosial-budaya. Pada umumnya, kebijakan luar negeri Australia dan kebijakan luar negeri Indonesia memang tidak cocok karena kedua negeri mempunyai kepentingan, kebutuhan dan ambisi yang berbeda. Misalnya, Australia adalah negara yang sudah maju dan bersekutu dengan AS dan Eropa Barat sedangkan Indonesia adalah negara sedang berkembang dan 'non-aligned' atau netral dalam Perang Dingin.¹¹⁴ Hubungan antara Australia dan Indonesia biasanya kurang bersahabat; salahpahaman memburuk hubungan terutama dalam hubungan dengan soal Timor Timur.¹¹⁵

I. Sebelum Kemerdekaan Timor Leste

Hubungan Australia dengan Indonesia sebelum kemerdekaan Timor Leste juga ditandai dinamika pasang surut. Kebanyakan pasang surut terjadi dalam secara politik. Sebelum Perang Dunia II hubungan antara Australia dan Hindia Belanda (nama jajahan untuk Indonesia) bercirikan saling pengabaian dan ketidaktahuan. Akan tetapi, waktu Jepang menyerbu Hindia Belanda dalam PDII Australia mengakui pentingnya Indonesia untuk keamanan Australia.¹¹⁶ Pada mulanya hubungan Australia dengan Indonesia positif. Setelah PDII sudah habis, konsep dekolonisasi

¹¹⁴Wanandi. J. 'Australia-Indonesia Relations in the Context of Developments in Asia-Pacific' dalam 1984. *Regional Dimensions of Inodnesia-Australia Relations*. Jakarta: CSIS. h. 6.

¹¹⁵Wanandi. h. 7.

¹¹⁶Anderson. h. 11.

ditimbul. Ketidakmampuan Belanda untuk melindungi jajahannya, Hindia Belanda, dari pendudukan Jepang menyebabkan masyarakat Hindia Belanda untuk mau kemerdekaan. Dalam perjuangan kemerdekaan Australia adalah sekutu yang kuat.¹¹⁷ Dari padangan politik, Australia memainkan peranan besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 1947 waktu Belanda mengumumkan aksi polisinil di Indonesia, Australia- dengan India- mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB.¹¹⁸ Kepentingan Indonesia, yakni kemauan kemerdekaan, diwakili Australia di PBB. Hakim Kirby dan T.C. Critchley yang bekerja dalam Kedutaan Besar bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia.¹¹⁹

Akan tetapi setelah keramah-tanahan permulaan, hubungannya dinormalisasi karena Indonesia merdeka yang baru mau memfokuskan pembangunan dalam negeri. Keadaan ini berjalan terus sampai tahun 1950an dan 1960an waktu isu-isu Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia dimunculkan.¹²⁰ Australia sangat khawatir dengan perkembangan dalam Irian Barat karena hubungannya khusus dengan Irian Papua. Selanjutnya pasukan Australia dan pasukan Indonesia berhadapan dalam Borneo selama saat Konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966.

Peristiwa ini mencerminkan perbedaan pendapat dan kepentingan antara Australia dan Indonesia. Hubungan menjadi kurang bersahabat waktu PKI (Parti Komunis Indonesia) mulai diperkuat. Dengan pemerintah Sukarno diganti pemerintah Suharto hubungannya diperbaiki. Kebijakan luar negeri yang ditetapkan pemerintah

¹¹⁷ Anderson. h. 12.

¹¹⁸ T. Adhitama. h. 136.

¹¹⁹ H. Rosihan Anwar. hh. 95-96.

¹²⁰ Anderson. h. 12.

Suharto digembirakan Australia karena kebijakan adalah pragmatik dan moderat, dengan tekanan pada kerjasama wilayah dan 'good neighbourliness'.¹²¹

Akan tetapi suasana kerjasama dipecahkan oleh beberapa peristiwa seperti integrasi Timor Portugis ke dalam Republik Indonesia, Laporan Dunn pada tahun 1983, artikel Jenkins dalam koran *Sydney Morning Herald* pada tahun 1986 dan Insiden Dili pada tahun 1991. Meskipun integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia didukung oleh pemerintah Australia dalam secara resmi, cara yang integrasi dilakukan dikecam Australia dan banyak orang Australia tidak setuju dengan pendirian pemerintahnya. Australia adalah satu-satunya negara yang mengakui Timor Timur sebagai propinsi Indonesia dalam secara resmi.

Lalu, pada tahun 1983 James Dunn, yang mantan Diplomat Australia, menulis laporan tentang proses integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia dan kekerasan yang berjalan terus. Katanya,

'The military seizure of East Timor has been a bloody operation, in which atrocities of a disturbing nature have been committed against the civilian population. Indeed, these accounts of Indonesia's behaviour in East Timor suggests that the plight of these people may well constitute, relatively speaking, the most serious case of contravention of human rights facing the world at this time.'¹²²

'pencaplokan militer Timor Timur adalah operasi yang sangat keras, dalam yang kekejaman-kekejaman yang menggelisahkan terjadi dan mengenai penduduk sipil. Memang, ceritera ini terhadap kelakuan Indonesia di Timor Timur memberi kesan keadaan rakyat Timor Timur mungkin merupakan kasus yang terserius pelanggaran hak asasi manusia yang saat ini dihadapi dunia.'

Selain itu, Laporan Dunn termasuk banyak kesaksian saksi mata dari pengunjung di Timor Timur. Nyata, reaksi Indonesia terhadap Laporan Dunn kuat sekali. Laporan

¹²¹ Anderson. h. 12.

¹²² Khairul. hh. 205-206.

Dunn merupakan pertama kali tokoh diplomat Australia mencela, dalam secara sangat buka, peranan Indonesia di Timor Timur. Keadaan digelorakan lagi waktu Dunn diundang Kongress AS untuk berbicara dengan Komite Hubungan Internasional.¹²³

Selanjutnya, pada tahun 1986 artikel yang ditulis Peter Jenkins untuk koran *Sydney Morning Herald*, yang dibahas kekayaan keluarga Suharto, diterbitkan. Sebenarnya, hubungan Australia dengan Indonesia diburuk, bukan karena diskusi tentang kekayaan keluarga Suharto tetapi karena artikel itu menyinggung korupsi, kollusi dan nepotisme (KKN) yang tersebar luas dalam pemerintah/keluarga Suharto. Artikel ini melemahkan hubungannya karena artikelnya menerima sesuatu yang kedua pemerintah menolak untuk mengakui.¹²⁴

Artikel Jenkins disambut hampir semua media massa Australia dan artikel Jenkins diterbitkan dalam koran-koran raksasa seperti *The Washington Post* dan *The Far Eastern Economic Review*, juga.¹²⁵ Jadi, bukan hanya pers Australia mencela Indonesia melainkan pers internasional juga. Dan ini terjadi karena artikel yang ditulis wartawan dari negara 'sahabat'. 'Hukuman' untuk pers Australia adalah larangan semua wartawan Australia untuk masuk Indonesia. Hukuman ini lebih keras daripada kelihatannya karena satu bulan kemudian Presiden AS Ronald Reagan mengunjungi Bali dan wartawan Australia tidak boleh masuk Indonesia. Indonesia

¹²³ 'Dunn mengganggu Adam Malik Keras'. h. 86.

¹²⁴ 'Dunn mengganggu Adam Malik Keras'. h. 87.

¹²⁵ Latif. A. 'Ancaman dari Selatan'. *Angkatan Bersenjata*. 2 Juni 1986 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 308.

sangat terhina oleh artikel Jenkins karena dulu antara tahun 1976 dan 1980 Jenkins adalah koresponden senior yang pernah bertugas dalam Indonesia.¹²⁶

Lima tahun kemudian, hubungan Australia-Indonesia diuji lagi waktu Insiden Dili terjadi. Peristiwa ini sudah dibahas dalam Bab 2 Bagian A IV. Meskipun pemerintah Australia mencela tindakan TNI dan peranannya di Timor Timur hubungan Australia dengan Indonesia tetapi tidak dipengaruhi dalam secara relatif. Reaksi ini yang sama untuk semua peristiwa yang tersebut. Pada umumnya, peliharaan hubungan baik dengan Indonesia ditekankan pemerintah Australia daripada mencela tindakan Indonesia. Tentu saja, opini umum memaksakan pemerintah Australia untuk mencela Indonesia. Selama tahun 1980an dan 1990an, hubungan Australia dengan Indonesia bersahabat dengan suasana kerjasama.

Hubungan pemerintah ke pemerintah baik pada tahun 1980an dan 1990an.¹²⁷ Ada politikus Australia yang masih curiga dengan Indonesia. Akan tetapi, masih ada politikus Indonesia yang tidak bias mengertia pentingnya Australia untuk Indonesia. Selaing itu hubungan tingkat tertinggi antara kepala Negara dekat. Sejak 1968 7 Perdanam Menteri Australia mengunjungi Indonesia; PM Gorton (1968), PM McMahan (1972), PM Whitlam (1973), PM Fraser (1976), PM Hawke, PM Keating dan PM Howard.¹²⁸ Antara tahun 1992 dan 1995 PM Keating mengunjungi Presiden Suharto 6 kali.¹²⁹

¹²⁶ 'Soal Berita Koran Australia Itu'. *Tempo*. Nd 1986 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 320.

¹²⁷ Wanandi h. 7.

¹²⁸ G. Mohamad. h. 81.

¹²⁹ Chalk. h. 234.

Dalam secara militer Australail dan Indonseia memilik hubungan dekat sekali. Selaing saat Konfrontasi, sebelum kemerdekaan Timor Leste tentara Australia dan Indonesia sering bekerjasama. Australia dan Indonesia persetujuan pertahanan yang bilateral. Antara tahun 1960 dan 1984 1.100 anggota Angkatan Bersenjata berasal dari Indonesia berlaith di Australia. Anggota Angkatan Bersenjata Australia juga berlatih di Indonesia. Hal ini mencerminkankedekatankepercayaan yang berada antara AUstrail dan Indonesia. Pada tahun 1972 Australia menghadiahkan kepada Indonesia pesawat Sabre. Tentara Australia dan tentara Indonesia juga mempunyai proyek bersama termasuk gerakan tentara bersama untuk angkatan laut dan angkatan udara. Selanjutnya dalam tahun 1980an Australia dan Indonesia bekerjasama dalam Proyek Patroli Maritim. Proyek ini menyebabkan Australia untuk mengadakan kepada tentara Indonesia pesawat Nomad, kapal patroli, alat-alat untuk komunikasi lapangan, helicopter, penasehat dan proyek pembuatan peta topografi dan geologi yang bersama. Suasana kerjasama mempertinggi pada tahun 1981 dan 1982 waktu bantuan Australia untuk Indonesia, menurut Program Kerjasama Pertahanan Australia (Australian Defence Co-operation Program) berjumlah A\$8,6 juta.¹³⁰ Selama tahun 1980an pemerintah Australia menekankan keterlibatan dalam wilayah melalui 'keamanan wilayah'.¹³¹

Tingkatan kerjasama dinaikkan lagi pada tahun 1995 wkatu *Agreement on Mutual Security* (AMS) dicapai Presiden Suharto dan PM Paul Keating.¹³² Persetujuan ini menetapkan kedua Negara harus berunding dengan Negara lain, dan kalau perlu, bertindakbersama lawan tantanganbersama. Persetujuan ini, walaupun bukan

¹³⁰ Anderson h. 16.

¹³¹ D. McDougall. 2001. 'Australia and Asia-Pacific Security Regionalism'. *Contemporary Southeast Asia*. 23 (1) April. h. 82.

¹³² Chalk h. 234.

persekutuan, menyediakan dasar untuk kerjasama lagi.¹³³ Ini mewakili persetujuan pertama yang resmi antara tentara Australia dan tentara Indonesia. AMD tetapi mengikat sampai AMS dilepaskan sementara proses kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999.

Secara strategis, hubungan Australia-Indonesia sangat penting. Untuk Australia, Indonesia adalah perbatasan terakhir untuk invasi dari utara.¹³⁴ Hubungan yang baik antara Australia dan Indonesia penting sekali untuk kemana dan stabilitas Asia Tenggara. Dari pandangan Indonesia, Australia bias memainkan peranan besar kalau Indonesia diancam. Sebagai Negara termaju dalam wilayah, Australia menjadi sekutu kuat untuk Indonesia, terutama sekali konteks Perang Dingin, waktu sekutuan Australia dan AS kuat.¹³⁵

Dalam secara ekonomik, hubungan antara Australia dan Indonesia kurang dekat. Sayang, ekonomi Indonesia dan ekonomi Australia tidak saling mengimbangi. Lagi pula kedua Negara memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Meskipun kesulitan ini hubungan ekonomik antara Australia dan Indonesia memang berada, walaupun ia masih kecil.¹³⁶ Kedua Indonesia dan Australia memiliki tingkat tinggi ekspor tenaga; Indonesia mengeksport minyak dan minyak gas sedangkan Australia mengeksport batu bara.¹³⁷

¹³³ McDougall. h. 86.

¹³⁴ Anderson. h. 11.

¹³⁵ Wanandi. hh. 6-7.

¹³⁶ Wanandi. h. 8.

¹³⁷ A.D. Brown. 'Energy and Food Security' dalam 1984. *Regional Dimension of Indonesia-Australia Relations*. Jakarta: CSIS. h. 110.

Pada mulanya tahun 1980an, hubungan ekonomi diperbaiki. Selama Krisis Minyak pada tahun 1970an Australia membantu Indonesia; Australia salah satu Negara yang bertemu untuk mengatasi masalah ekonomi yang kronis yang dihadapi Indonesia.¹³⁸ Perdagangan bilateral dinaikkan selama awal tahun 1980an. Pada tahun 1980/81 perdagangan bilateral berjumlah A\$775 juta dan pada tahun 1981/82 perdagangan ditambah sampai A\$932 juta. Pada tahun 1981/82 kelebihan perdagangan Indonesia dengan Australia ditambah sampai lebih daripada A\$100 juta. Dalam masa sama, investasi Australia dalam Indonesia berjumlah lebih daripada A\$200 juta.¹³⁹

Akan tetapi, selama pertengahan tahun 1980an hubungan ekonomi berubah. Ekspor Indonesia ke Australia diturun dari A\$561 milyar (pada tahun 1982/83) ke A\$310 milyar pada tahun 1986/87. Keturunan ini mewakili keturunan kira-kira 14,3% setiap tahunnya.¹⁴⁰ Potensiil dalam pasar Indonesia terlihat Australia. Oleh karena itu Australia berusaha cukup agresif untuk masuk pasar Indonesia. Impor Indonesia dari Australia meningkat hanya A\$405 juta pada tahun 1982/83. Akan tetapi pada tahun 1986/87 ia berjumlah A\$511 juta. Kenaikan ini mewakili kenaikan 8,3% selama masa 4 tahun.¹⁴¹ Akibatnya perdagangan defisit dialami Indonesia yang berjumlah A\$201 juta pada tahun 1986/87. Selama tahun 1990an hubungan ekonomi memfokuskan serpis, terutama pendidikan.

Selain hubungan perdagangan Australia dan Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang lain juga. Indonesia adalah penerima bantuan Australia yang kedua terbesar-

¹³⁸ Anderson. h. 12.

¹³⁹ Anderson. h. 15.

¹⁴⁰ Widjaja. A. 'Hubungan Ekonomi Indonesia dan Australia Tak Seimbang'. *Suara Pembaruan*. 30 April 1988 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 201.

¹⁴¹ Widjaja. h. 202.

Papua Nugini adalah penerima terbesar. Banyak bantuan Australia bukan pinjaman tetapi dana bantuan. Ini berarti Indonesia tidak harus membayar kembali. Hal ini mencerminkan pentingnya Indonesia untuk Australia, bukan saja di bidang ekonomi juga melainkan bidang politik dan strategi.¹⁴²

Walaupun hubungan ekonomi ini kebanyakan tokoh baik di Indonesia maupun Australia berpercaya hubungannya bisa diperbaiki. Misalnya, perdagangan, terutama dalam bidang sumber-sumber alami seperti batu bara dan bijih besi, industri-industri dan teknologi yang sudah maju.¹⁴³

Aspek sosial-budaya hubungan Australia-Indonesia sangat menarik. Australia dan Indonesia tidak memiliki ideologi bersamaan, atau afinitas dalam secara agama, sosial-budaya atau ras.¹⁴⁴ Pada awalnya hubungan sosial-budaya diwarnai oleh dua padangan yang bersaing. Setelah PDII suasana positif karena rakyat Indonesia, dan perjuangannya untuk kemerdekaan dibantu oleh pemerintah dan masyarakat Australia.¹⁴⁵ Akan tetapi, masyarakat Australia selalu takut dengan ancaman penyerbuan dari utara. Walaupun ancaman terutama berasal dari Cina dan Jepang kebanyakan masyarakat juga mengerti Indonesia sebagai ancaman juga. Khawatir ini memuncak waktu Perang Dingin mulai dan PKI menjadi lebih kuat. Akibatnya, hubungan manusia kurang sahabat setelah PDII. Dengan penghancuran PKI, hubungan diperbaiki tetapi masyarakat Australia masih curiga dengan Indonesia.

¹⁴² Rosihan Anwar h. 90-91.

¹⁴³ Wanandi h. 10.

¹⁴⁴ Anderson h. 10.

¹⁴⁵ Adhitama. h. 136.

Selain peristiwa tersebut, hubungan antara rakyat Indonesia dan rakyat Australia kurang sahabat. Pada tahun 1977 koran *The Age* menerbitkan survey opini umum yang menyatakan 36% orang yang disurvei menganggap Indonesia agresif. Indonesia adalah satu-satunya Negara yang terbanyak orang menganggap sebagai agresif.¹⁴⁶ Survei ini dilakukan setelah integrasi Timor OPortugis dan mempertunjukkan pencelaan masyarakat Australia kena isu itu. Banyak orang Australia menganggap pemerintah Suharto sebagai otoriter. Lagi pula, HAM, oposisi politik dan pers bebas adalah masalah besar dalam kerangka hubungan social-budaya.¹⁴⁷ Tambahan pariwisata pun tidak bisa memperbaiki hubungannya.¹⁴⁸

Satu kelompok yang mempunyai pengaruh yang tidak ada bandingannya adalah media massa. Media massa Australia dicela Indonesia karena ia sering menggambarkan Indonesia cara negative. Akan tetapi hubungan yang kurang sahabat kesalahan media massa dari kedua Negara. Media massa Australia memiliki sikap 'kebenaran diri' waktu menganalisa urusan Indonesia. Sikap ini yang moralistic dan sombong yang dimiliki oleh masyarakat Australia memburuk hubungannya.¹⁴⁹ Kesan Indonesia dari media massa Australia kurang baik dan ini menyebabkan masyarakat Australia untuk mempunyai salahpahaman tentang masyarakat Indonesia.

namun, setelah 41 tahun mereka mempelajari Indonesia, masih belum juga mereka mempunyai persepsi yang baik tentang bangsa yang menganut falsafah hidaup Pancasila yang religius, humanistic dan kerakyatan, yang mengutamakan pengendalian diri dan harmoni dalam kehdiupan. Pastilah ada sesuatu yang tidak beres pada bangsa Australia.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Rosihan Anwar. h. 94.

¹⁴⁷ Rosihan Anwar. h. 94.

¹⁴⁸ Wanandi. h. 7.

¹⁴⁹ Wanandi. h. 8.

¹⁵⁰ Wahyono. S.K. 'Australia dan Persepsi Ancaman dari Utara'. *Angkatan Bersenjata*. 22 April 1986 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 235.

Selanjutnya , ketidaktahuan pers Indonesia tentang urusan Australia berarti masyarakat Indonesia mempunyai kekurangan pengertian tentang masyarakat dan budaya Australia. Akibatnya kedua masyarakat menjadi tidak diberi tahu, atau lebih buruk, memberi keterangan yang salah. Jadi, pers Indonesia dan pers Australia harus menggantikan pendapatannya terhadap negara lain karena pers memainkan peranan besar dalam hubungan sosial-budaya.

Misalnya, pada bulan Januari 1987 Rebecca Gilling, yang memainkan peran Stephanie Harper dalam serial Australia 'Return to Eden' yang sangat populer di Indonesia, diajak ke Jakarta oleh Duta Besar Australia, Bill Morrison. Ada pandangan bahwa kunjungan Rebecca Gilling ke Indonesia untuk memperbaiki citra Australia di tengah public Indonesia.¹⁵¹

Akan tetapi selama tahun 1980an dan terutama 1990an, hubungan sosial-budaya mengalami perubahan. Pertama, bahasa Indonesia menjadi lebih besar dalam kurikulum sekolah Australia. Bahasa Indonesia diajari dalam sekolah Australia sejak tahun 1950an tetapi selama 1980an dan 1990an menjadi lebih luas.¹⁵² Di sisi lain, perlawanan Australia lawan tindakan Indonesia di Timor Timur juga ditambah selama tahun 1990an, khususnya waktu Insiden Dili terjadi pada tahun 1991 dan Hadiah Nobel pada tahun 1996. Perlawanan dari masyarakat Australia berjalan terus sampai tahun 1999 waktu Timor Leste menjadi merdeka.

¹⁵¹ 'Stephanie dan Bill Morrison'. *Pelita*. 28 Januari 1987 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 337-338.

¹⁵² 'Bahasa Indonesia in North Australia'. *Indonesia Times*. 24 Nopember 1987 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny.). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. h. 199.

Hubungan Australia-Indonesia, sebelum kemerdekaan Timor Leste, ditandai dinamika pasangsurut. Dengan berberapa kekecualian, hubungan antara pemerintah baik, khususnya selama tahun-tahun PM Hawke dan PM Keating. Jumlah persepsi dan kepentingan yang bersamaan, terutama di bidany politik dan ekonomi, jauh lebih penting daripada jumlah perbedaan dan kesulitan. Menurut De Gaulle ‘bangsa-bangsa tidak memiliki sahabat yang tetapi, hanya memiliki kepentingan yang tetap.’¹⁵³ Sebenarnya, Australia dan Indonesia memiliki banyak kepentingan bersamaan di bidang politik, ekonomik dan sosial-budaya. Akan tetapi, mereka juga memiliki perbedaan yang fundamental. Jadi, hubungan Australia dengan Indonesia mengalami masa yang kedua Negara dekat dan masa yang mereka jauh. Keseluruhannya, hubungannya positif, khususnya waktu hubungan dibandingkan dengan hubungan sebelum PDII. Setidaknya, Indonesia dan Australia mengakui peradaan Negara lain dan mencoba berhidup berdampingan.

II. *Pada saat Kemerdekaan Timor Leste*

Peristiwa di Timor Timur yang tersebut, mempunyai pengaruh dalam terhadap hubungan Australia dengan Indonesia. Hubungan politik/diplomatik hampir dihancurkan. Reaksi baik di Indonesia dan Australia sangat kuat dan langsung. Kebanyakan perubahan hubungan terjadi dalam bidang politik, terutama aspek militer, dan sosial-budaya. Perubahan pasti terjadi dalam bidang ekonomik juga kaan tetapi penganalisaan perubahan ini sulit karena hubungan ekonomik sudah diganggu oleh Krisis Moneter pada tahun 1997 dan 1998, dan instabilitas, cipil dan politik, dalam Indonesia yang adalah akibat pengunduran diri Presiden Suharto. Dampak politik peranan Australia dalam proses kunjungan resmi di semua tingkatan

¹⁵³ Anderson. h. 14.

dibatalkan.¹⁵⁴ Kedutaan besar Australia di Jakarta ada 'status peringatan tertinggi'. Peringatan ini dinaikkan lagi karena serangan mengenai Dubes Australia John McCartney yang terjadi di Mahassa, Sulawesi Selatan, pada bulan Nopember 2000.¹⁵⁵ Kedutaan besar Indonesia di Australia juga ada siap siaga yang dipertinggi. Hubungannya antara politikus Australia dan politikus Indonesia juga diburuk; kedua para politikus saling mencela dalam secara sangat buka. Lagi pula, waktu Australia mengkembang 'pos' diplomatik di Timor Leste, kendatipun permintaan Indonesia untuk sabar, hubungan diburuk lagi.

Akan tetapi hubungan militer juga mengalami perubahan besar. Misalnya, AMS dilepaskan. Sejak permulaannya pada tahun 1995 AMS merupakan pondasi kerjasama militer antara Australia dan Indonesia. Menurut Menteri Urusan Politik dan Sekuriti, Feisal Tanjung, tindakan Australia di Timor Timur tidak tetap dengan 'isi dan jiwa persetujuan'.¹⁵⁶

Selanjutnya, semua operasi dan gerakan bersama langsung dihentikan. Pasukan yang sebelumnya bekerjasama, dan menjadi dekat dalam secara resmi dan pribadi, menjadi musuh.¹⁵⁷ Pasukan Australia dan pasukan Indonesia memang musuh. Bukti berada yang menunjukkan angkatan bersenjata Indonesia mempersiapkan menyerbu kapal dan kapal selam Australia dan Selandia Baru yang berpatroli di Selat Timor. Kedua pihak mempersiapkan untuk semua keadaan.¹⁵⁸ Selain itu, untuk alasan yang sangat jelas, penjual senjata Australia kepada Indonesia juga dihentikan.

¹⁵⁴ Chalk. h. 238.

¹⁵⁵ Chalk. h. 237.

¹⁵⁶ Chalk. h. 237.

¹⁵⁷ Chalk. h. 238.

¹⁵⁸ Chalk. h. 238.

Hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia lebih sulit untuk diuraikan. Sebagai tersebut dulu, aktivitas ekonomi Indonesia sudah sangat terbatas sebagian akibat KrisMon dan instabilitas internal. Akan tetapi, sebelum peristiwa Timor Timur Australia membantu Indonesia secara ekonomi, mencoba mempengaruhi *International Monetary Fund* (IMF) dan AS untuk mengurangi keketatan syarat program-programnya. Pada saat kemerdekaan Timor Leste, Australia, serta AS, memanfaatkan IMF untuk memaksa Indonesia untuk membolehkan masuknya pasukan multinasional. Terlepas dari itu, bantuan ekonomik dari Australia, khususnya bantuan ekonomi untuk tentara sangat terbatas.

Pada saat kemerdekaan Timor Leste hubungan sosial-budaya memburuk juga. Dampak jangka-pendek termasuk peringatan perjalanan dari pemerintah Australia yang sangat kuat. Perjalanan yang tidak sangat penting seharusnya ditunda atau dibatalkan. Kedua negara mengalami demonstrasi besar. Demo-demo yang terjadi di Jakarta memiliki perasaan anti-Australia yang kuat sekali. Demo-demo yang sama terjadi di ibu kota-ibu kota Australia juga. Salahpahaman, kecurigaan dan prasangka yang sudah lama tidak ucapkan, ditimbulkan peranan Australia dan peranan Indonesia di Timor Timur.

Hal ini digelorakan lagi pers dan media massa di kedua Australia dan Indonesia. Jarang ada siaran berita yang netral. Memang keadaan di Timor Timur buruk sekali, tetapi banyak wartawan Australia tidak menganggap peranan Australia dalam proses integrasi dan setelah integrasi. Akan tetapi, pers Indonesia bersalah juga. Peranan Australia di Timor Timur tidak mewakili maksudnya untuk mencampuri dalam isu-isu Indonesia yang lain. Australia juga mengalami tekanan dari PBB dan AS untuk

mencampuri di Timor Timur. Media massa memiliki pengaruh dalam terhadap persepsi-persepsi masyarakat baik di Australia maupun Indonesia.

Nyata, pada saat kemerdekaan Timor Leste semua hubungan antara Australia dan Indonesia, hubungan politik, ekonomi dan sosial-budaya diburuk. Hubungan ini dalam keadaan yang terburuk. Kadang, keadaan seperti ini memberi kesempatan untuk hubungan diganti dan diperbaiki, tetapi dalam kasus Australia dan Indonesia kesempatan ini tidak berada. Kepercayaan dihancurkan untuk kedua negara; keduanya saling dikhianati. Kekurangan kepercayaan dan kekurangan ideologi, sejarah, budaya dan ras yang bersama berarti tidak ada dasar untuk hubungan didirikan lagi.

III. Pasca Kemerdekaan Timor Leste

Bahwa hubungan antara Australia dan Indonesia sebenarnya hampir dihancurkan sudah terkenal kemana-mana. Sepanjang tahun 1990an hubungan cukup bersahabatan. Peristiwa-peristiwa baru-baru sudah memperbaiki hubungan Australia dengan Indonesia. Walaupun, pasca kemerdekaan Timor Leste hubungan Australia dengan Indonesia keadaan yang paling buruk dalam sejarah. Sebelum kejadian Bom Bali pada tahun 2002, rupa-rupanya pembangunan kembali hubungannya akan makan banyak waktu. Bom Bali mengalih arah hubungannya. Tragedinya mengenai kedua negara dan mereka terpaksa untuk bekerjasama. Fokus bagian ini adalah keadaan hubungan; aspek politik, ekonomik dan sosial-budaya, pasca kemerdekaan Timor Leste tetapi sebelum Bom Bali.

Hubungan politik antara Australia dan Indonesia menjadi sangat dingin, pasca kemerdekaan Timor Leste. Hubungan memang memulai perbaikan waktu Presiden Wahid mengunjungi Australia pada bulan Juni 2001. Kunjungan ini adalah

kunjungan pertama dari Presiden Indonesia ke Australia sejak Presiden Suharto mengunjungi Australia pada tahun 1975.¹⁵⁹ Kunjungan ini didahului pertemuan tingkat tinggi Australian-Indonesian Ministerial Forum – AIMF (Majelis Kementerian Australia-Indonesia)- pada bulan Desember 2000. Majelis dihadiri 5 menteri Indonesia dan 11 menteri Australia. Dalam pembahasan majelis beberapa persetujuan ekonomi dicapai.¹⁶⁰ Hubungannya dengan Indonesia- yang dipanggil hubungan Australia yang terburuk- mulai diperbaiki sedikit-demi-sedikit.¹⁶¹ Dengan memburuknya hubungan Australia dengan Indonesia, kebijakan luar negeri Australia menjadi lebih fokus kepada hubungannya dengan AS.¹⁶² Banyak ahli mengatakan pengalihan fokus sehingga merusak hubungan wilayah. Ini sangat benar dalam hubungan dengan serangan teroris di New York dan Washington DC pada tanggal 11 September 2001, yang menggoyahkan hubungan lagi. Pendirian Australia yang kuat dan dukungan untuk AS dalam ‘Perang lawan Teror’nya dan Perang Irak menghina Indonesia. Indonesia adalah negara yang terbanyak penduduk Islam. ‘Perang lawan Teror’ terlihat sebagai perang lawan agama Islam. Akan tetapi peristiwa-peristiwa September 11 juga memperbaiki hubungan Australia dengan Indonesia, karena kedua harus bekerjasama melawan terorisme bukan saja hubungan bilateral juga melainkan rangka multinasional dan wilayah.¹⁶³ Kerjasama ini tidak lama bertahan. Komentar PM John Howard bahwa Australia bisa bertindak sebagai ‘deputy sheriff AS’ dalam wilayah melemahkan lagi hubungan. Lagi pula, putusan Australia untuk membeli misil cruise dan komentar PM Howard bahwa Australia boleh mengadakan serangan

¹⁵⁹ ‘DFAT Annual Report 2000-2001, Outcome 1.1.2 and 1.2.2’. *Department of Foreign Affairs and Trade Website*. http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/00_01/s02/02_1-12-.html diakses 20 Mei 2005.

¹⁶⁰ ‘DFAT Annual Report 2000-2001’ 20 Mei 2005.

¹⁶¹ V. Marsh. 2005. ‘Spotlight falls on Canberra’s place in Asia Australia’s Response’. *Financial Times*, 16 Oktober diakses melalui ProQuest.

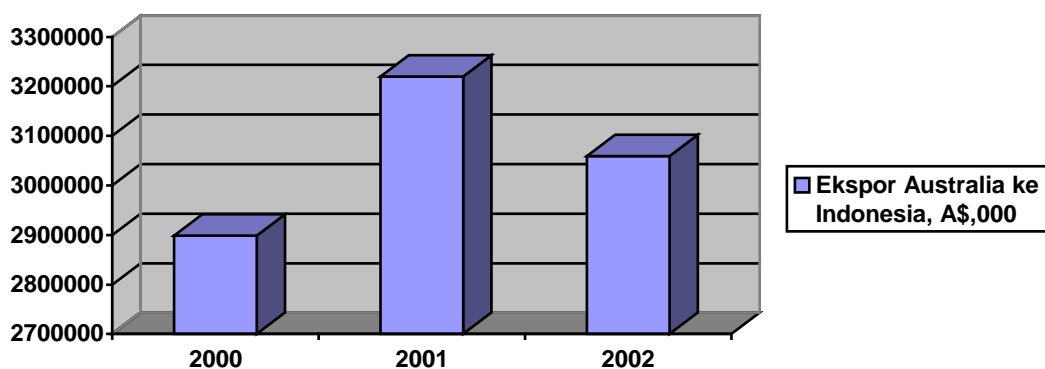
¹⁶² Marsh. ProQuest.

¹⁶³ Marsh. ProQuest.

yang menduduki lebih dulu melawan organisasi teroris di Asia Tenggara, tidak memperbaiki keadaan.¹⁶⁴

Secara militer, hubungannya dingin dan hanya diperbaiki waktu hubungan politik diperbaiki. Kedua tentara masih tidak saling mempercayai. Tentara Australia meragukan integritas dan sifat profesional tentara Indonesia. Tentara Indonesia juga meragukan maksud-maksud tentara Australia.

Antara tahun 2000 dan tahun 2002 hubungan ekonomik antara Australia dan Indonesia diperbaiki. Ini karena ekonomi Indonesia diperbaiki setelah itu dihancurkan KrisMon pada tahun 1997 dan 1998. Misalnya ekspor pokok Australia ke Indonesia meningkat A\$2.892.638.000 pada tahun 2000. Pada tahun 2001 nilai ekspor tersebut adalah A\$3.219.572.000- tambahan 11,3% dalam satu tahun. Akan tetapi pada tahun 2002 ekspor turun hampir 5% sampai A\$3.059.364.000. Meskipun penurunan ini, selama 3 tahun ekspor Australia ke Indonesia bertambah 5,76%.¹⁶⁵

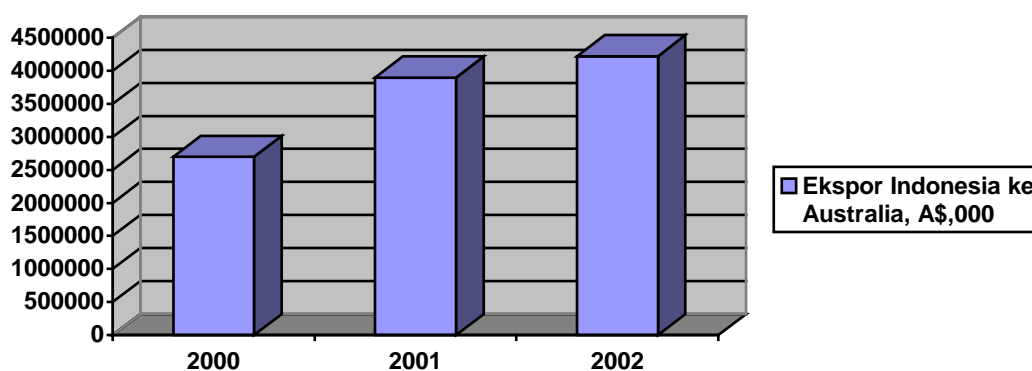


Gambar 1. Sumber: 'Indonesia Country Brief- May 2005'. *Department of Foreign Affairs and Trade*. http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html diakses 20 Mei 2005.

¹⁶⁴ 2005. 'Asia: How to be a neighbour; Indonesia and Australia' *The Economist*. 15 Januari diakses melalui ProQuest.

¹⁶⁵ 'Indonesia Country Brief- May 2005'. *Department of Foreign Affairs and Trade*. http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html diakses 20 Mei 2005.

Ekspor Indonesia juga bertambah selama tahun 2000, 2001 dan 2002. Sebagai contoh pada tahun 2000 ekspor Indonesia ke Australia berjumlah A\$2.699.626.000. Tahun 2001 ekspor ini meningkat A\$3.898.401.000. Tambahan ini mewakili tambahan ekspor Indonesia yang kira-kira 31%. Walaupun ekspor Australia turun pada tahun 2002, ekspor Indonesia ke Australia bertambah selama tahun yang sama; dari A\$3.898.401.000 ke S\$4.221.614.000 pada tahun 2002. Hal ini mengalami kenaikan sekitar 8.29%. Dan selama masa 3 tahun ekspor Indonesia bertambah 56%.¹⁶⁶



Gambar 2. Sumber: 'Indonesia Country Brief- May 2005'. *Department of Foreign Affairs and Trade*. http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html diakses 20 Mei 2005.

Tambahan ini luar biasa untuk ukuran Indonesia sendiri dan mengingat tambahannya dicapai selama masa kemunduran ekonomi dunia yang terjadi setelah 11 September 2001, tambahan ini lebih luar biasa lagi.

Selain indikasi-indikasi ini, hubungan pemerintah di bidang ekonomi juga diperbaiki. Pertama, sebagai tersebut dulu, di AIMF berberapa persetujuan ekonomik dicapai. Kemudian pada bulan Pebruari 2001 Menteri Pedagangan Mark Vaile mengunjungi Indonesia. Vaile ditemani oleh wakil dari 16 perusahaan Australia. Salah satu hasil

¹⁶⁶ 'Indonesia Country Brief- May 2005'. 20 Mei 2005.

dari kunjungan adalah pengumuman investasi Australia yang baru dalam Indonesia yang berjumlah A\$550 juta.¹⁶⁷

Pasca kemerdekaan Timor Leste hubungan sosial-budaya sejak tahun 2000 penurunan, namun ada upaya yang memperbaiki secara pelan-pelan. Pada mulanya, hubungan sosial-budaya masih kurang bersahabat karena perasaan pengkhianatan dan kekecewaan masih segar. Peringatan perjalanan tetap tingkat tinggi. Selanjutnya, pengalihan fokus pemerintah Australia dari wilayah Asia Tenggara ke AS dicerminkan kekurangan perhatian terhadap bahasa Indonesia dan pelajaran Asia, baik di semua tingkat sekolah dan universitas. Sejak pertengahan 1990an bahasa Indonesia dan Pelajaran Asia sedang menghilang dari kurikulum sekolah dan universitas yang ada di Australia.

Kurangannya perhatian ini mulai berubah sebelum tahun 2001. Pastilah, mahasiswa Indonesia masih ingin belajar ke Australia. Sampai bulan April 2001 18.000 mahasiswa Indonesia belajar di universitas-universitas Australia.¹⁶⁸ Demikian pula dilakukan oleh mahasiswa Australia; 60 mahasiswa Australia belajar di berbagai universitas di Yogyakarta dan Malang.¹⁶⁹ Meskipun jumlah mahasiswa Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah mahasiswa Australia yang belajar di Indonesia, ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, di Indonesia bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang diajari di sekolah dan universitas padahal di Australia ada banyak bahasa yang diajari, seperti bahasa Italia, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang dan bahasa Cina. Oleh karena itu ada kurang banyak mahasiswa Australia yang mengambil

¹⁶⁷ 'DFAT Annual Report 2000-2001' 20 Mei 2005.

¹⁶⁸ 'Indonesia Country Brief- May 2005', 20 Mei 2005.

¹⁶⁹ 'Aussie- Indonesia Ties Should Also be seen from people-to-people perspective, says Envoy'. 2001. *Antara*. 18 April diakses melalui ProQuest.

bahasa Indonesia sebagai fokus kajian dan bisa memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya masih ada perbedaan dalam pendidikan antara Australia dan Indonesia, khususnya di tingkat universitas. Misalnya, fasilitas yang ada jauh berbeda. Di Australia internet sudah biasa, tersebar dan membentuk inti pelajaran. Selain itu, keadaan di Indonesia masih dianggap tidak aman dan tidak stabil. Peringatan perjalanan masih selalu disampaikan.

Lagi pula lebih daripada 200 guru Australia mengajari bahasa Inggris di sekolah negeri dan sekolah internasional.¹⁷⁰

Hubungan sosial-budaya mengalami kemerosotan waktu 11 September terjadi. Di Australia banyak tindakan anti-Islam terjadi. Misalnya, bus sekolah Islam yang penuh mahasiswa dipukuli dengan batu. Lagi pula banyak orang Indonesia terhina dukungan Australia untuk AS dan 'Perang lawan Teroris'. Pertama, pemerintah Afghanistan, Taliban, dihancurkan karena ternyata membantu para teroris. Akan tetapi, pandangan lain, Taliban digulingkan karena mereka orang Islam yang fundamental dan AS dan Australia takut pengaruh Islam menjadi terlalu kuat.

Dari ini hubungan Australia dengan Indonesia, pasca kemerdekaan Timor Leste positif dalam secara relatif. Di bidang ekonomi hubungan diperbaiki. Hubungannya juga diperbaiki dalam secara politik yang disoroti kunjungan pertama dari Presiden Indonesia sejak tahun 1975. Sebenarnya, suasana hubungannya masih penuh dengan kecurigaan, ketidakpercayaan dan rasa permusuhan. Akan tetapi

¹⁷⁰ 'Aussie-Indonesia Ties should be also be seen from people-to-people perspective, says Envoy'. ProQuest.

peristiwa 11 September 2001 dan 12 Oktober 2002 memaksa Indonesia dan Australia untuk mengatasi perbedaan.

D. Proses Perubahan yang Terjadi

Nyata, kontribusi Australia dalam proses kemerdekaan Timor Leste sangat mempengaruhi hubungan Australia dengan Indonesia. Sukar untuk menerka apabila hubungannya diperbaiki apalagi dengan terjadinya Bom Bali. Apa yang pasti adalah hubungan Australia dengan Indonesia mengalami perubahan dalam aspek politik, ekonomik dan sosial-budaya.

I. Aspek Politik

Aspek politik hubungannya mengalami banyak perubahan. Pergantian pemerintah Indonesia juga harus dipertimbangkan karena ini memainkan peranan besar dalam perubahan yang terjadi di bidang politik. Dalam hal itu perubahan sukar untuk menguraikan karena pengunduran diri Suharto dan kemerdekaan Timor Leste terjadi dalam satu tahun. Pada tahun 2001 kunjung pertama dari Presiden Indonesia ke Australia dalam 24 tahun terakhir. Tetapi ini adalah akibat perubahan hubungan yang disebabkan kemerdekaan Timor Leste atau gantian pemerintah Indonesia? Jawaban yang lebih benar adalah kedua. Australia sudah menunjukkan kesudian untuk mengorbankan hubungannya dengan Indonesia demi kepentingan lebih besar. Sebenarnya, Australia bisa hidup tanpa hubungan baik dengan Indonesia karena ia sudah maju. Dibandingkan Indonesia sedang berkembang dan perlu bantuan dari Australia sementara ekonomi Indonesia direstruktur. Hubungan yang baik penting untuk kedua negara, terutama secara ekonomi untuk Indonesia dan secara strategis untuk Australia.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan ancaman. Selama Perang Dingin, yakni sebelum kemerdekaan Timor Leste, Australia dan Indonesia memiliki ancaman bersamaan; komunisme. Dengan pengakhiran Perang Dingin Australia dan Indonesia memiliki hubungan baik karena suasana kerjasama sudah berada. Akan tetapi setelah kemerdekaan Timor Leste kerjasama dihancurkan dan segera sesudah itu ancaman bersama tidak berada. Ini diganti oleh peristiwa September 11. Saat itu, Indonesia dan Australia mempunyai kesempatan untuk membangun kembali hubungan politik.

Hubungan militer lebih sulit untuk memperbaiki. Hubungan militer, termasuk aspek politik dan aspek sosial. Persetujuan politik bisa menyebabkan tentara-tentara bekerjasama. Akan tetapi hubungan ini berdasar kepercayaan. Sebelum kemerdekaan Timor Leste mereka sudah lama bekerjasama. Pada saat kemerdekaan kepercayaan yang dibangun dihancurkan. Supaya memperbaiki hubungan militer kepercayaan harus kembali dulu. Ini sudah mulai, terutama dalam peranan tentara-tentara di jawaban Bom Bali dan Tsunami.

II. Aspek Ekonomik

Aspek ekonomik dalam perubahan sukar untuk menguraikan karena banyak faktor tidak tetap. Hubungan berubah sebagai ekonomi Indonesia dikembangkan. Segera sesudah kemerdekaan Timor Leste perdagangan antara Australia dan Indonesia bertambah. Akan tetapi, ini juga bisa disebabkan pengunduran diri Suharto dan program 'structural adjustment' yang dilaksanakan IMF. Sebagai akibat peristiwa-peristiwa ini ekonomi Indonesia lebih stabil dan dapat diramalkan. Akan tetapi, bisa dikata bahwa bisnis, terutama menurut filsafat bisnis Barat, bukan berdasar emosi tetapi logis dan untung. Jadi, meskipun hubungan yang kurang bersahabat dalam secara politik dan sosial-budaya, hubungan ekonomi berjalan terus. Hubungan

ekonomik masih berdasar ekspor sama baik sebelum maupun pasca kemerdekaan Timor Leste; minyak tanah mentah dan emas dari Indonesia dan katun dan aluminium dan dari Australia. Akan tetapi, dengan penormalisasian hubungan, ekspor serpis-serpis, seperti pendidikan, juga bertambah.

III. *Aspek Sosial-Budaya*

Hubungan sosial-budaya antara Australia dan Indonesia tidak mengalami perubahan besar dari sebelum ke pasca kemerdekaan Timor Leste. Hubungan sosial-budaya, biasanya, berdasar emosional sedangkan aspek politik dan ekonomik berdasar logis dan untung. Waktu sikap masyarakat sudah dibentuk menjadi sukar untuk berubah. Sepanjang sejarah masyarakat Indonesia dan masyarakat Australia saling mencurigakan. Ini tidak berubah setelah kemerdekaan Timor Leste. Kecurigaan benar-benar bertambah. Pertama, selama Perang Dingin masyarakat Australia curiga terhadap orang Komunis di Indonesia. Lalu, selama proses di Timor Leste masyarakat Australia curiga terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Indonesia. Kecurigaan ini berjalan terus sampai Bom Bali terjadi dan kecurigaan berubah untuk mengenai teroris dan orang Islam.

Pada umumnya, orang Australia menganggap Indonesia sebagai tidak demokratik dan korup. Mereka tidak bisa mengerti perlunya Indonesia untuk Australia. Ini sudah menyebabkan pelajaran bahasa Indonesia dan Asia untuk dikurangi. Demikian juga, banyak orang Indonesia masih menganggap orang Australia sombong tetapi mereka juga menilai kesempatan untuk belajar di Australia. Oleh karena banyak orang Indonesia belajar di Australia mereka berkembang pengertian masyarakat dan budaya Australia. Ini tidak dibalas orang Australia. Selain Bali dan Jakarta, orang Australia jarang mengunjungi bagian Indonesia yang lain. Perbedaan dalam bahasa, agama dan

budaya juga harus ditimbangkan. Selama zaman Suharto, terutama pada tahun 1980an dan 1990an, perbedaan ini kurang penting. Pertama agama kurang penting untuk pemerintah Suharto. Kedua, bahasa Indonesia diajari secara luas di Australia. Sekarang perbedaan benar-benar berada dan kedua pihak enggan untuk menerima atau mengatasi perbedaan ini.

Bab 3 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif. Walaupun aspek kuantitatif dianggap, seperti apakah kebanyakan responden menjawab dalam secara positif atau tidak, fokus pokok adalah persepsi-persepsi responden terhadap Australia, khususnya setelah kemerdekaan Timor Leste. Responden-responden ditanyakan kesan Australia yang pertama dan pengalaman dulu dengan Australia. Pengalaman bisa termasuk pelajaran Australia di sekolah, universitas atau kursus swasta, kunjungan ke Australia atau hubungan dengan orang Australia, baik di secara langsung maupun tidak langsung, seperti keluarga, teman atau kolega. Diharapkan ini menggambarkan responden-responden tingkat pengertian Australia dan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi jawabannya.

Dari situ, pertanyaan menunjukan ingatan responden-responden terhadap peristiwa di Timor Timur dan peranan Australia dalam proses itu. Dua hal ditunjukkan tanyaan ini. Pertama, ini menunjukkan apakah proses kemerdekaan Timor Leste tetap segar di pikiran masyarakat dan apakah responden-responden bisa ingat peranan Australia dalam prosesnya. Kedua, jawaban responden menunjukkan pengetahuan tentang peristiwa, apakah salah atau benar, yang juga menjelaskan peranan media mass dan prasangkanya.

B. Informan Penelitian

Informan-informan yang dipakai untuk penelitian ini termasuk mahasiswa dan dosen dari bermacam universitas di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Mahasiswa dan dosen dipilih sebagai informan untuk penelitian ini karena diharapkan mereka sudah memiliki sedikitnya suatu pengetahuan Australia. Selanjutnya, mahasiswa dan dosen mewakili dua generasi. Misalnya, waktu Timor Portugis diintegrasikan ke dalam Indonesia, dosen-dosen masih muda dan masih belajar. Dibandingkan, mahasiswa-mahasiswa belum lahir waktu integrasi Timor Portugis terjadi. Oleh karena itu kelompok mahasiswa dan kelompok dosen memiliki pengalaman berbeda dalam hubungan dengan soal Timor Timur.

Selain perbedaan umur yang berada antara mahasiswa dan dosen, umur bukan pertimbangan dalam pemilihan. Walaupun responden termasuk mahasiswa dan dosen dari kedua jenis kelamin, kebanyakan responden laki-laki. Ini terjadi untuk beberapa alasan. Pertama, laki-laki kelihatan lebih mau untuk membahas topik politik. Lagi pula, mereka tidak khawatir kalau jawabannya 'salah'. Perempuan yang diwawancarai kelihatan kurang yakin, dan menekankan kekurangannya pengetahuan politik. Dan ini benar di Indonesia, bidang politik, pada umumnya, masih bidang laki-laki.

Mahasiswa dan dosen yang diwawancarai belajar/bekerja di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang dan Universitas Airlangga Surabaya. Mereka berasal dari bermacam jurusan dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Hukum.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Pebruari 2005 dan Mei 2005. Sudah lama kemerdekaan Timor Leste terjadi. Dan ini ada 2 dampak yang sangat menarik. Pertama, responden-responden, biasanya, mengingat peristiwa utama, atau hal terpenting. Segera sesudah peristiwa media massa dibanjiri dengan informasi baik benar maupun salah. Hal yang diingat responden merupakan inti untuk persepsinya Australia. Banyak peristiwa sudah terjadi, seperti 11 September 2001, Bom Bali 2002 dan Tsunami 2004 yang mempengaruhi hubungan resmi dan persepsi-persepsi, mungkin dalam secara lebih besar daripada kemerdekaan Timor Leste.

D. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpul wawancara dan observasi dari wawancara. Jenis wawancara adalah wawancara semi-struktur. Wawancara yang semi-struktur dibolehkan wawancara bisa disesuaikan ke pengalaman responden. Pada permulaannya, penelitian ini dilakukan pemakaian wawancara dan observasi dalam wawancara itu. Akan tetapi, sebagai akibat komponen presentasi penelitian ini kecenderungan, yang tidak terlihat dalam hasil wawancara, pasti disaksikan. Meskipun reaksi-reaksi ini tidak diharapkan dalam konteks itu, mereka sangat berguna untuk menunjukkan jawaban emosional terhadap soal kemerdekaan Timor Leste.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisa menurut kecenderungan dan perasaan bersamaan yang ditimublkan. Lalu kecenderungan ini dibandingkan dengan data dari Bab 2 supaya menguraikan apakah kebijakan pemerintah mempengaruhi persepsi masyarakat dan sebaliknya. Tujuan penelitian adalah menganalisa pengaruh kemerdekaan Timor Leste terhadap

hubungan Australia dengan Indonesia baik di tingkat pemerintah maupun tingkat manusia. Oleh karena itu teknik analisis data memfokuskan kedua tingkat ini.

Bab 4 Pembahasan Hasil Penelitian

Keseluruhan hasil penelitian dan pengumpulan data sebagai diharapkan. Waktu responden menanyakan kesan Australia atau pendapat Australia jawaban selalu positif. Kebanyakan responden mengerti Australia sebagai tetangga Indonesia yang terdekat dan oleh karena itu Indonesia harus berusaha bekerjasama dengan Australia. Orang yang sudah belajar tentang Australia di tingkat universitas, yaitu S1 atau S2, memiliki pengertian yang lebih dalam dibandingkan responden yang lain. Perbedaan antara kedua negara diakui oleh responden-responden. Walaupun beberapa responden mengkomenter keadaan sekarang, yang baik, kebanyakan responden juga memikirkan masa depan hubungan. Misalnya, sesuatu responden menghitung; '[Australia] punya potensi besar di masa depan'. Ini dalam hubungan dengan hubungannya dengan Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Tambahan lagi, banyak responden mengerti dan mengakui masa depan Indonesia sangat berkaitan dengan hubungannya dengan Australia. Akan tetapi dari jawaban pertama pun, rupa-rupanya perasaan keenggan untuk mencela masyarakat dan pemerintah Australia, dan ini dapat dianggap sebagai tanda hormat untuk budaya dan masyarakat Australia.

A. Kontribusi Australia dalam Proses Kemerdekaan Timor Leste

Dalam hubungan dengan peranan Australia dalam proses tersebut, jawaban lebih berbeda. Responden-responden menunjukkan keseganan untuk mencela tindakan Australia, meskipun perasaan pribadi sendiri. Ingatannya peranan Australia ada banyak macam. Beberapa responden berdasar peranan Australia dalam rangka PBB; UNAMET, INTERFET, dan UNTAET, sedangkan responden lain memfokuskan peranan individu. Semua responden mengakui Australia memainkan peranan dalam proses tersebut. Akan tetapi responden tidak setuju pada ukuran kontribusi Australia.

Berberapa responden terpercaya bahwa kontribusi Australia sesuai dengan kontribusi negara lain yang maju dan Barat.

Dibandingkan yang lain mengerti peranan Australia memang cukup besar, khususnya mengingat INTERFET dan UNTAET dipimpin Australia dan kebanyakan sukarelawan dan pasukan berasal dari Australia. Satu atau dua responden membahas kemungkinan peranan Australia terlalu besar, yakni Australia memanipulasi hasil jajak pendapat dan menyusun peristiwa di Timor Timur. Pandangan ini pasti membuktikan literatur-literatur Indonesia terhadap soal Timor Timur. Di buku 'Hari-hari terakhir Timor Timur' banyak bagian membahas kontribusi Australia yang tidak resmi. Sebagai sokongan pandangan responden yang Australia berusaha mempengaruhi hasil jajak pendapat di Timor Timur, ada kejadian yang warganegara Australia bertindak tidak sopan. Tersebut dulu, warganegara Australia dideportasi untuk menyebarkan kartu suara yang sudah dilumbang dalam sokongan merdeka. Lagi pula, warganegara Australia terdapat menyelundupkan obat dan senjata untuk Fretilin. Dan, biasanya, orang Australia di Timor Timur merasa simpati kepada masyarakat Timor Timur.

Dari observasi presentasi ternyata perasaan kecewaan dan kecurigaan terhadap Australia masih segar untuk beberapa orang Indonesia. Ini diperkuat oleh dukungan Australia terhadap pendirian AS di tempat lain, seperti Timor Tengah dan Afghanistan. Reaksi-reaksi sangat berdasar emosi dan dalam konteks ini menunjukkan reaksi kuat yang hampir anti-Australia. Reaksi ini jug ditunjukkan di demonstrasi-demonstrasi di Jakarta.¹⁷¹

¹⁷¹ Hasil observasi 31 Mei 2005.

Penulis-penulis meragukan kenertalan PBB. Hal ini juga dibahas sesuatu responden yang berpercaya bahwa PBB dikuasai AS dan Australia mencampuri di Timor Timur supaya diperbaiki sekutu AS. Dia menguraikan pendapatnya. Misalnya, kepentingan Australia lebih baik kalau Timor Timur merdeka karena Australia bisa mendominasi hubungannya dengan Timor Leste sedangkan hubungannya dengan Indonesia lebih seimbang. Ini benar, khususnya dalam kaitan dengan sumber-sumber alam seperti kawanan ikan, minyak tanah dan gas minyak dari Selat Timor. Tambahan lagi kepentingan strategis Australia juga diperbaiki kalau Timor Leste merdeka. Kepentingan ini tidak disebut dalam secara eksplisit dalam literatur. Namun, kepentingan Australia juga dibahas literatur Indonesia dan literatur Australia. Sebagai contoh, pengumuman berita pemerintah Australia menekankan dukungan AS untuk peranan Australia di Timor Timur. Pastilah hubungan ini pertimbangan penting dalam putusan Australia. Kepentingan ini juga diperiksa dalam 'Hari-hari Terakhir Timor Timur'. Kenyataannya bahwa Australia dipilih untuk memimpin INTERFET dan UNTAET menebalkan pendapat ini. Banyak responden mengakui bahwa pandangan memang berada tetapi menitikberatkan pandangan itu tidak wakil kebanyakan orang Indonesia.

Sebagai dijelaskan salah satu responden, ada dua pandangan tentang peranan Australia. Pertama Australia berkontribusi dalam rangka PBB; mengakui peranan cukup besar. Kedua, proses kemerdekaan Timor Leste dimulai pemerintah Australia, terutama surat yang dikirim PM Howard. Pada umumnya, ingatan responden menyetujui dengan pandangan bahwa peranan Australia memadai peranan negara lain. Akan tetapi, oleh menganalisa peranan Australia di UNAMET, INTERFET dan

UNTAET peranan Australia memang besar. Sebagian terbesar sukarelawan, pasukan dan pemimpin berasal dari Australia. Tentara Australia menyumbang peralatan dan logistik untuk intervensi PBB, dan Australia adalah tempat evakuasi waktu staf PBB harus dievakuasi. Pembiayaan finansial juga besar. Rupa-rupanya responden mengingat kontribusi militer saja. Tetapi, banyak responden tidak menyebut kaitan kontribusi Australia dan intervensi PBB. Peranan PBB jarang ditekankan pemerintah Australia. Alasan untuk menekankan peranan PBB adalah mengurangi peranan Australia supaya memelihara hubungan Australia dengan Indonesia.

Dari hasil wawancara, pemerintah Australia tidak berhasil. Australia masih dilihat sebagai pemain terbesar dalam proses tersebut. Sangat mengherankan, tidak ada satu responden yang menyebut peranan Australia dalam integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia pada tahun 1970an. Literatur yang mencela kontribusi Australia memanfaatkan sokongan Australia untuk integrasi dalam tahun 1970an untuk menggambarkan kekurangan kenetralan dan pentingnya kepentingan Australia dalam putusannya mencampuri di Timor Timur. Dibandingkan literatur yang mendukung kontribusi Australia jarang menyebut kebijakan Australia yang dulu. Mungkin, karena sebagian terbesar responden tidak belajar banyak tentang Australia, mereka tidak tahu. Akan tetapi dua dosen yang diwawancarai dari Jurusan Ilmu Pemerintahan juga tidak menyebut kebijakan Australia 1970an.

Salah satu ekspresi kecewa dengan kontribusi Australia adalah demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Menurut responden-responden demo-demo tidak wakil masyarakat Indonesia. Kebanyakan media massa di Australia memanfaatkan

demo-demo ini membangun sentimen anti-Indonesia di Australia, Lagi, peranan pers dan media menyebabkan masalah dan salahpahaman.

Keseluruhan, hasil penelitian berkaitan kontribusi Australia dalam proses kemerdekaan menunjukkan orang yang diwawancarai berpercaya bahwa peranan Australia cocok untuk keadaannya; sebagai negara Barat yang maju dan kaya. Pastilah, ada bukti yang menggambarkan kontribusi Australia tidak suci. Pandangan ini diakui berberapa responden tetapi ada hanya satu yang bilang, terus terang, Australia mau Timor Timur merdeka dan memanipulasi jajak pendapat dan menyalahgunakan mayoritasnya di Timor Timur untuk mencapai tujuan ini. Surat PM Howard adalah contoh kuat campur tangan dalam soal Timor Timur.

Selain itu, kontribusi Australia dianggap sebagai biasa. Literatur-literatur Australia menekankan jawaban bersifat multinasional. Akan tetapi, hal ini dicerminkan secara lemah, hasil wawancara. Australia masih dianggap sebagai pemain pokok dalam proses tersebut; secara positif sekaligus negatif.

B. Hubungan Australia dengan Indonesia

Sebagai satu responden bilang, 'setelah kemerdekaan Timor Leste hubungan Australia dengan Indonesia seperti teka-teki yang sudah dibongkar. Sekarang ia terus ditata kembali sedikit-demi-sedikit.'¹⁷² Sebelum Bom Bali hubungannya sedikit diperbaiki dalam secara politik dan sosial-budaya. Hubungan ekonomik diperbaiki segera sesudah peristiwa-peristiwa Timor Leste. Terkenal kemana-mana hubungan Australia dengan Indonesia tidak bisa lebih buruk kecuali kalau kedua negara ada keadaan perang.

¹⁷² Hasil wawancara dengan Mas Wedha.

Sebelum kemerdekaan Timor Leste hubungan ditandai dinamika pasang surut tetapi pada umumnya hubungan bersahabat. Sementara dan pasca kemerdekaan Timor Leste hubungan bukan bersahabat dan kerjasama terpaksa. Misalnya, di rapat APEC pada tahun 2001, Presiden Megawati Sukarnoputri menolak omong dengan PM Howard. Tetapi kedua negara juga berusaha keras untuk memperbaiki hubungan; AIMF dan kunjungan Presiden Wahid. Hubungan ini juga menjadi lebih bersifat selalu mencela. Sebelumnya Indonesia terlalu penting kepada Australia untuk Australia membahayakan hubungannya oleh mencela Indonesia untuk isu-isu sensitif, seperti HAM, kekurangan demokrasi atau tindakan di Timor Timur. Dan Indonesia bukan diam berkaitan isu-isu wilayah dan jawaban Australia.¹⁷³

Hubungannya penting untuk Indonesia dan Australia. Australia bisa berjalan terus tanpa hubungan baik dengan Indonesia, kecuali bahwa hubungan dengan Indonesia penting untuk reputasi/status Australia dalam ASEAN.

Perspsi-persepsi masyarakat Indonesia memang mengalami perubahan terhadap pemerintah Australia. Setelah kemerdekaan Timor Leste pemerintah Australia terlihat sebagai negara yang suka campur tangan dalam urusan Indonesia dan urusan Asia; sebuah wilayah yang tidak termasuk Australia. Kebanyakan orang dapat berpisah pendapatnya terhadap pemerintah Australia dari hubungan dengan masyarakat Australia.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Bu Tatik.

Hubungan ekonomik kelihatan tidak dipengaruhi peristiwa-peristiwa Timor Timur. Secara ekonomik peristiwa-peristiwa yang mendahului kemerdekaan Timor Leste lebih penting; KrisMon dan pengunduran diri Suharto. Sebetulnya, kerjasama ekonomik datang sebelum kerjasama politik. Mungkin ini terjadi karena hubungan ekonomik lebih egois dan rasional; hal yang terpenting adalah untung. Oleh karen itu perasaan kecewaan dan kekhianatan tidak dirasa dalam cara sama sebagai hubungan politik dan sosial-budaya.

Segera sesudah kemerdekaan Timor Leste perdagangan bertambah. Satu alasan ini terjadi adalah karena ekonomi Indonesia menjadi stabil sedangkan ekonomi-ekonomi di AS, Timor Tengah dan Eropa diganggu, khususnya setelah September 11 dan Bom-bom Kereta Api di Madrid.

Kedadaan ekonomik dibantu karena selama proses kemerdekaan Timor Leste sanksi ekonomi tidak dilaksanakan. Kepentingan Australia yang jangka-panjang lebih baik kalau ekonomi Indonesia stabil karena pasar Indonesia belum dimasuk secara luas dan miliki banyak potensi.

Hubungan sosial-budaya juga dipengaruhi peristiwa di Timor Timur. Peringatan perjalanan tetap berada dan ada orang di Australia dan Indonesia yang tidak menyukai orang dari negara lain. Meskipun peringatan perjalanan, wisatawan Australia masih berliburan di Bali. Tukaran pelajar juga berjalan terus, meskipun pada saat itu ada petukaran yang dibatalkan. Akan tetapi mahasiswa Australia yang belajar di Indonesia dikurangi sedangkan mahasiswa Indonesia di Australia bertambah.

Perbedaan sebagian disebabkan karena perhatian Asia di Australia, bahasa dan pelajaran Asia dikurangi juga.

Pers juga memainkan peranan besar di hubungan sosial-budaya. Siaran berita memperkuat prasangka dan kecurigaan. Australia digambarkan sebagai tetangga yang kaya, sombong dan suka mencampuri. Dibandingkan, Indonesia digambarkan penggertak yang kejam, keras dan melanggar HAM. Pada umumnya Indonesia digambarkan sebagai tidak beradab. Walaupun hubungan sosial-budaya sedikit berganti, hubungan antara manusia tidak berganti. Hubungan masih bergantung pada pengalaman dan ambisi pribadi.¹⁷⁴ Misalnya, universitas Indonesia masih mengirimkan dosen bahasa Inggris ke Australia untuk belajar. Masyarakat Indonesia mampu berpisah pendapat kemerdekaan Timor Leste dari hubungan pribadi dengan orang Australia.

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Mas Wedha.

Bab 5 Penutup

A. Kesimpulan

Kemerdekaan Timor Leste mempunyai pengaruh amat sangar terhadap hubungan Australia dengan Indonesia. Niscaya, peristiwa-peristiwa pada tahun 1999 adalah saat yang menentukan dalam hubungannya. Ia mewakili perubahan kebijakan Australia yang sangat besar dan penting. Akibat-akibat perubahan kebijakan tersebar luas dan mempengaruhi hubungan politik, ekonomik dan sosial budaya baik di Australia maupun Indonesia.

Secara sejarah, hubungan Indonesia dengan Timor Leste dan hubungan Australia dengan Indonesia harus dipertimbangkan. Salah satu alasan hubungan dihancurkan sampai sedemikian luas adalah karena perasaan Indonesia kecewa dan khianatan. Perubahan kebijakan Australia dipahami pemerintah Indonesia sebagai keadaan tertinggalan.

Integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesi didukung Australia dan negara Barat lain, pada tahun 1970an. Pastilah, alasan untuk dukungannya bergantung konteks Perang Dingin. Namun, hanya PBB dan Portugal menyatakan pencelaannya terhadap integrasi. Australia juga mencela Indonesia, bukan untuk integrasi sendiri tetapi untuk cara yang dilakukan. Waktu Timor Timur menjadi propinisi Indonesia dalam secara resmi, Australia adalah satu-satunya negara yang mengakuinya resmi melalui persetujuan dengan Indonesia tentang Selat Timor.

Selama masa penguasaan Indonesia, keadaan di Timor Timur diperbaiki, dibandingkan masa penguasaan Portugis. Akan tetapi perjuangan untuk merdeka berjalan terus. Kekerasan antara pasukan Indonesia dan pasukan merdeka berjalan terus. Lagi pula, pemerintah Australia tidak mau melihat kekerasan lawan masyarakat Timor Timur atau perjuangannya untuk merdeka dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hubungan baik dengan Indonesia dan pemerintah Suharto lebih penting. Sikap Australia ini berjalan terus samapi tahun 1998 waktu peristiwa-peristiwa di Indonesia memberi kesempatan kepada Australia untuk perubahan dramatik. Kesempatan ini digunakan. Kontribusi Australia dalam proses kemerdekaan mencakup bidang yang luas; politik, diplomatik, militer, ekonomik dan sosial-budaya. Kemerdekaan Timor Leste sendiri tidak mempengaruhi hubungan antara Australia dan Indonesia, tetapi kontribusi Australia dalam proses berbuat. Sudah lama Australia mendukung integrasinya, tetapi selama 6 bulan Australia menjadi kritik yang terkuat. Proses tersebut dimulai PM Howard sendiri, dengan pengiriman surat kepada Presiden Habibie. Apakah PM Howard dan penasehat-penasehatnya berpikir bahwa Presiden Habibie langsung menawarkan otonomi atau merdeka atau tidak, proses memang dimulai. Lalu, Australia menyumbang sebagian terbesar sumber-sumber intervensi PBB; kedua personil dan peralatan. Apabila Australia menyalahgunakan kuasanya sebagai pemimpin intervensi dan memanipulasi jajak pendapat belum diketahui. Namun, peranan Australia cukup besar untuk mengganggu hubungannya dengan Indonesia dan menghancurkan suasana kerjasama dan jasa baik.

Pada umumnya, sebelum kemerdekaan Timor Leste hubungan Australia dengan Indonesia cukup bersahabat. Kedua negara memiliki kepentingan yang dapat

dipengaruhi negara lain. Misalnya, Indonesia, terutama dalam zaman Suharto, bergantung pada Australia untuk bantuan selama Indonesia dikembang secara ekonomi, Indonesia juga penting untuk Australia. Pertama secara strategis, Indonesia sekutu penting sekali. Pemerintah Suharto anti-komunis yang kuat. Australia tidak diancam langsung oleh Indonesia. Indonesia juga digunakan sebagai tenaga penahan lawan ekspansi komunis. Kedua, hubungan Australia dengan Indonesia menunjukkan kemampuan Australia berada di Asia dan hubungan dengan negara Asia yang lain, khususnya negara ASEAN. Australia juga memainkan peran strategis untuk Indonesia. Kalau ada ancaman komunis Australia akan mencampuri dan melindungi pemerintah anti-komunis.

Tentu saja peristiwa terjadi yang mengganggu hubungannya. Misalnya, proses integrasi, Laporan Dunn, artikel Peter Jenkins, dan Insiden Dili semua menyebabkan masalah-masalah antara Australia dan Indonesia. Selain peristiwa-peristiwa itu, sampai tahun 1990an hubungannya yang terdekat daripada pernah sebelum.

Kemudian, KrisMon dan pengunduran diri Suharto mengubah keadaan dalam negeri Indonesia dan kesempatan untuk perubahan digunakan Australia. Penasehat-penasehat Australia berpercaya bahwa Indonesia bisa selamat terlepas Timor Timur sekaligus mengalami perubahan sosial dan politik yang besar.

Mungkin, penasehat-penasehat tidak menyadari pengaruh lengkap kontribusi Australia dalam kemerdekaan. Atau mungkin, mereka berpikir bahwa Timor Timur mewakili masalah berjalan terus dan kurang penting di mata TNI dan para politikus Indonesia. Alasan apapun, hubungannya memang dihancurkan, secara politik, militer

dan sosial-budaya. Perasaan ketidakpercayaan dibangun antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Masyarakat Australia juga menjadi curiga terhadap pemerintah Indonesia. Secara sama, bagian masyarakat Indonesia curiga maksud-maksud pemerintah Australia.

Untunglah, kecurigaan dan ketidakpercayaan tidak bisa menembus persepsi-persepsi masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Australia. Biasanya, kontribusi Australia dalam proses tersebut diertikan sebagai tindakan atau hal politik yang tidak ada kaitan dengan hubungan antara manusia. Sulit untuk bilang bahwa jika perasaan ini dibalas masyarakat Australia. Pertama, pemerintah Australia memiliki pengaruh yang lebih langsung terhadap hidup sehari-hari masyarakat Australia. Juga lebih banyak penduduk Australia bisa mengakses sumber-sumber informasi; televisi, radio, surat kabar, internet dan lain-lain. Dibandingkan banyak penduduk Indonesia tidak ada akses dalam secara sama. Oleh karena itu, hampir semua masyarakat Australia menyadari peristiwa Timor Timur dan peranan Indonesia sedangkan sebar informasi di Indonesia lebih batas.

Akan tetapi, ada batasan penelitain ini. Misalnya sudah lama sejak kemerdekaan Timor Leste. Oleh karena itu, peristiwa lain sudah terjadi yang mempengaruhi persepsi-perspesi masyarakat Indonesia, seperti Bom Bali, Tsunami dan kasus Schapelle Corby. Lagi pula, orang yang diwawancarai enggan untuk menjawab dengan pandangan negatif; mereka tidak mau mencela pemerintah atau masyarakat Australia. Selanjutnya, kemerdekaan Timor Leste tidak mempunyai efek langsung terhadap hidup sehari-hari responden. Jika penelitian ini dilakukan di Jakarta atau Timor Barat mungking hasilnya berbeda.

Apa yang yakni kemerdekaan Timor Leste dan kontribusi Australia sangat mempengaruhi hubungan antara Australia dan Indonesia. Tidak ada negara yang tidak ada konflik dengan tetangganya. Itu biasa.

Tidak ada sebuah bangsa yang tidak membutuhkan, yang tidak saling membutuhkan. Tidak ada sebuah tetangga bangsa yang tidak saling merupakan. Tidak ada sebuah bangsa yang tidak saling membutuhkan. Oleh karena itu, hubungan baik harus dikembangkan anantara Australia dan Indonesia.¹⁷⁵

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini banyak rekomendasi ditimbulkan, terutama dalam bidang kebijakan luar negeri Australia. Pertama, pemerintah Australia harus tahu bahwa reaksi-reaksi masyarakat Indonesia, dan persepsi-persepsinya terhadap masyarakat Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste tidak bisa ditetapkan sebagai contoh reaksi terhadap kebijakan yang akan datang. Kasus Timor Leste sangat khusus. Sebagian contoh, sebagian terbesar masyarakat Indonesia tidak dipengaruhi dalam secara langsung. Jadi, kebijakan Australia yang lain, seperti kebijakan serangan ‘pre-emptif’ lawan organisasi teroris, memiliki potensi untuk mempengaruhi lebih banyak penduduk Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan Australia yang akan datang harus mempertimbangkan persepsi-persepsi masyarakat Indonesia. Tetapi masyarakat Indonesia bukan masyarakat Jakarta ataupun masyarakat koat-kota Jawa. Indonesia benar-benar negara bermacam-macam. Masyarakat Indonesia termasuk orang sangat miskin, orang sangat kaya, orang kota, orang desa, orang yang mempunyai pendidikan tinggi

¹⁷⁵ Hasil wawancara Pak Mas’ud, tanggal

dan orang yang tidak ada pendidikan. Semua kelompok ini harus dipertimbangkan karena, sebagai digambarkan September 11 dan Bom Bali warganegara bisa diancamkan keamanan negara. Pertimbangan ini juga membuat kebijakan Australia lebih humane. Tentu saja, kepentingan Australia masih pertimbangan terpenting tetapi kalau aspek kesejahateran sosial bisa termasuk juga, hubungan menjadi lebih kuat sekaligus kurang egois.

Akhirnya, departmen luar negeri harus menambah pengertian budaya dan masyarakat Indonesia. Ini bisa dicapai melalui lebih banyak petukaran untuk mahasiswa, profesional, militer, politikus dan lain-lain. Pemerintah seharusnya membesarkan hati pelajaran Aisa dan bahasa Indonesia. Pada sisi lain, pemerintah Indonesia seharusnya memudahkan belajar di Indonesia untuk mahasiswa Australia. Kedua departmen luar negeri harus mempekerjakan ahli Indonesia dan ahli Australia dan menghormati pengetahuannya budaya dan masyarakat negara lain.

Daftar Pustaka

“Nggak Ada Fretilin” (?). *Tempo*. 22 Nopember 1975 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 79-81.

2005. ‘Asia: How to be a neighbour; Indonesia and Australia’. *The Economist*. 15 Januari diakses melalui ProQuest.

‘At the launch of the book East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Change’. *Foreign Ministers Webpage*. <<http://www.foreignminister.gov.au> diakses 16 Mei 2005.

2001. ‘Aussie-Indonesian Ties Should Also be seen from people-to-people perspective, says Envoy’. *Antara*. 18 April 2001 diakses melalui ProQuest.

‘Bahasa Indonesia in North Australia’. *Indonesia Times*. 24 Nopember 1987 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 198-200.

‘DFAT Annual Report 2000-2001, Outcome 1.1.2 and 1.2.2’ *Department of Foreign Affairs and Trade Website*, http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/00_01/s02/02_1-12-.html diakses 20 Mei 2005.

‘Dunn Mengganggu Adam Malik Keras’. *Tempo*. 26 Maret 1977 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 86-89.

‘East Timor democracy leaders named Nobel Peace Prize winners’. *CNN interactive World News Story Page*. <http://www.cnn.com/WORLD/9610/11/nobel> diakses 27 April 2005.

‘Indonesia Country Brief- May 2005’, *Department of Foreign Affairs and Trade*, http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html diakses 20 Mei 2005.

‘Pers Australia Harus Pertimbangkan Hal Sensitif’. *Angkatan Bersenjata*. 26 Oktober 1998 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 325-328.

‘Soal Berita Koran Australia Itu’. *Tempo*. Nd 1986 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 320-322.

‘Statement. 15 May, 2002. East Timor: Birth of a Nation’. http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/020515_fa_etimor.html diakses 16 Mei 2005.

'Stephanie dan Bill Morrison'. Pelita. 28 Januari 1987 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 337-339.

'The Santa Cruz Massacre'. *East Timor Action Network US*. <http://www.etan.org/timor.SntaCRUZ.htm> diakses 25 April 2005.

'Timor, Setelah Petrodollar'. Tempo 25 Oktober 1975 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 73-75.

'Yudhoyono prays at site of Dili Massacre'. *SMH.com Digital Fairfax*. <http://www.smh.com.au/news/World/Yudhoyono-prays-at-site-of-Dili-massacre/2005/04/09/1112997218540.html?oneclick+true> diakses 25 April 2005. 2000.

2002. *Perserikatan Bangsa-bangsa dan Timor Lorosae. Penentuan nasib sendiri melalui Jajak Pendapat*. New York: Departmen Peneranga Publik Persierikatan Bangsa-Bangsa.

Adhitama. T. 'Indonesia-Australia: Jalan Menuju Peningkatan Kerja Sama'. Eksekutif. September 1985 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 136-145.

Anderson. H.D. 'Australia-Indonesia Relations' dalam 1984. *Regional Dimensions of Indonesia-Australia Relations*. Jakarta: CSIS. hh. 10-17.

2005. Burton. B. 'Australia: Ex-Premier Whitlam ducks queries on East Timor Views' *Global Information Network*. 4 Januari diakses melalui ProQuest.

P. Chalk 'Australia and Indonesia: Rebuilding Relations After East Timor' hh. 233-251.

Cotton. J. 2001. 'Against the grain: The East Timor Intervention'. *Survival*. Spring. 43 (1) diakses melalui ProQuest.

Emmerson. D.K. 'Pemilu dan kekerasan: Tantangan Tahun 1999-2000' dalam Emmerson. D.K. (peny). 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hh. 614-646.

Forrester. G. 2002. *Indonesia Paca Soeharto*. Yogyakarta: Wacana Intelektualitas Umat.

Khairul Jasmi. 2002. *Euricos Guterres. Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Latif. A. 'Ancaman dari Selatan'. Angkatan Bersenjata. 2 Juni 1986 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 308-313.

- Makarim. Z.A. dkk. 2003. *Hari-Hari Terakhir Timor Timur. Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo.
- Maley. W. 2000. 'Australia and the East Timor crisis: Some critical comments'. *Australian Journal of International Affairs*. Juli. 54 (2). hh.151-161.
- Marsh. V. 2005. 'Spotlight falls on Canberra's place in Asia Australia's Response'. *Financial Times*. 16 Oktober diakses melalui ProQuest.
- McDougall. D. 2001. 'Australia and Asia-Pacific Security Regionalism' *Contemporary Southeast Asia*. 23 (1). April. hh. 81-100.
- Mohamad. G. 'Apa yang Bisa (dan Tidak Bisa) Dilakukan Fraser'. Tempo 9 Oktober 1976 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 81-86.
- Muchtar. V. dan Jauhari. H. 'Pembawa Missi Diplomatik yang Berhasil: Stephanie, Rebecca!, I Love You'. Pikiran Rakyat. 27 Januari 1987 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 329-331.
- Rosihan Anwar. H. 'Yang mengganjal dan yang Melancarkan Hubungan Australia-Indonesia'. Kompas. 24 April 1979 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 89-97.
- Schwarz. A. 1994. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. St.Leonards: Allen & Unwin.
- Snow. D.M. 2003. *Cases in International Relations: Portraits of the Future*. New York: Longman.
- Sudarsono. J. 'Australia-Indonesia: Tukar Pikiran Akal Sehat'. Tempo. 11 Agustus 1984 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 133-136.
- Wahyono. S.K. 'Australia dan Persepsi Ancaman dari Utara'. Angkatan Bersenjata. 22 April 1986 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 233-237.
- Wanandi. J. 'Australia-Indonesia Relations in the Context of Developments in Asia-Pacific' dalam 1984. *Regional Dimensions of Inodnesia-Australia Relations*. Jakarta: CSIS. hh. 3-9.
- Widjaja. A. 'Hubungan Ekonomi Indonesia dan Australia Tak Seimbang'. Suara Pembaruan. 30 April 1988 dalam Kitley .P. Chauvel. R. dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 200-206.

Zainal Abidin Midun. H. 'Australia Masih Terjepit dalam Masalah Pelintas Batas dari Irian Jaya'. Berita Buana. 2 Januari 1986 dalam Kitley .P., Chauvel. R., dan Reeve .D. (peny). 1989. *Australia di Mata Indonesia. Kumpul Pers Indonesia 1973-1988*. Jakarta: PT Gramedia. hh. 145-150.